



PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN MDGs DI DAERAH (RAD MDGs)



KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN 2010



**PEDOMAN
PENYUSUNAN RENCANA AKSI
PERCEPATAN PENCAPAIAN
TUJUAN MDGs DI DAERAH
(RAD MDGs)**

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN 2010

Kata Pengantar

Pencapaian target Milienium Development Goals (MDGs) merupakan pemenuhan komitmen internasional yang sejalan dengan upaya pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan rakyat. Laporan Pemerintah Indonesia pada Sidang Majelis Umum ke-65 (*High-level Plenary Meeting on MDGs*) yang dilaksanakan pada tanggal 27-29 September 2010 di New York mengungkapkan bahwa kinerja pencapaian target MDGs Indonesia telah sejalan dengan kinerja pencapaian target MDGs yang tercantum dalam Laporan Pencapaian MDGs Global Tahun 2010.

Meskipun kinerja pencapaian target MDGs di tingkat nasional sudah cukup baik, namun disparitas kinerja antarprovinsi dan kabupaten/kota masih sangat bervariasi. Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama lintas sektor dan lintas bidang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, peningkatan kemitraan antara pemerintah dengan swasta, serta peningkatan peran aktif masyarakat untuk menangani disparitas kinerja tersebut.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ditugaskan untuk merumuskan Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs, sebagaimana yang tercantum dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan terkait Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs). Untuk itu, Bappenas telah menyelesaikan penyusunan Peta Jalan (roadmap) Nasional Percepatan Pencapaian MDGs, yang merupakan RAN MDGs. Peta Jalan tersebut selanjutnya merupakan acuan utama dalam penyusunan RAD MDGs, yang bertujuan untuk mendukung percepatan pencapaian target MDGs di daerah.

Pedoman Penyusunan RAD MDGs sebagaimana yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tersebut, berisikan cara pengorganisasian, langkah teknis, dan sistematika penyusunan RAD MDGs, serta dilengkapi pula dengan matriks rencana aksinya. Pedoman ini diharapkan dapat memberikan petunjuk bagi pemerintah daerah dalam menyusun RAD MDGs sehingga setiap daerah dapat menyusun dokumen strategis yang menggambarkan upaya sinergis dalam pencapaian target MDGs di pusat dan daerah.

Kami harapkan pedoman ini dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam menyusun RAD MDGs yang berkualitas, untuk mendukung terlaksananya percepatan pencapaian MDGs di daerah dalam menyejahterakan masyarakat.

Jakarta, November 2010

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to read 'A. S. A.' followed by a period.

Armida S. Alisjahbana

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar	iv
Daftar Singkatan	v
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan	4
1.3 Ruang Lingkup	4
1.4 Landasan Hukum.....	4
 BAB II KETERKAITAN MDGs DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN.....	 9
2.1 Keterkaitan MDGs dengan RPJMN	11
2.2 Keterkaitan MDGs dengan Pembangunan Daerah.....	12
2.3 Kebijakan RPJMN 2010-2014 Terkait Percepatan Pencapaian Target MDGs.....	13
 BAB III LANGKAH TEKNIS DAN JADWAL PENYUSUNAN RAD MDGs	 19
3.1 Dokumen yang Perlu Diperhatikan dalam Penyusunan RAD MDGs	21
3.2 Langkah-langkah Teknis Penyusunan RAD MDGs.....	23
3.3 Pembiayaan	23
3.4 Jadwal Penyusunan RAD MDGs	24
 BAB IV SISTEMATIKA RAD MDGs	 25
4.1 Sistematika Dokumen RAD MDGs	27
4.2 Matrik RAD MDGs dan Penjelasannya	29
 BAB V PENGORGANISASIAN PENYUSUNAN RAD MDGs.....	 33
5.1 Pengorganisasian	35
5.2 Uraian Tugas	37
5.3 Mekanisme Kerja.....	37
 BAB VI PENUTUP	 40

Lampiran

1. List Indikator MDGs	45
2. Pencapaian Indikator MDGs Nasional	49
3. Profil Pencapaian MDGs Provinsi	55
4. Dokumen Kebijakan Lainnya yang Perlu diperhatikan dalam Penyusunan RAD MDGs	61
5. Contoh matrik masing-masing target MDGs	
a. Matrik Tujuan 1 (menanggulangi kemiskinan dan kelaparan);	00
b. Matrik Tujuan 2 (mencapai pendidikan dasar untuk semua);	00
c. Matrik Tujuan 3 (mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan);	00
d. Matrik Tujuan 4 (menurunkan angka kematian anak);	00
e. Matrik Tujuan 5 (meningkatkan kesehatan ibu);	00
f. Matrik Tujuan 6 (memerangi penyakit HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya);	00
g. Matrik Tujuan 7 (memastikan kelestarian lingkungan hidup).	00

Daftar Tabel

Tabel 1. Jadwal Penyusunan RAD MDGs.....	24
Tabel 2. Matrik Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target MDGs...	29
Tabel 3. Organisasi dan Tanggung Jawab Pokja Penyusunan RAD MDGs.....	36

Daftar Gambar

Gambar 1. Integrasi MDGs dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan.....	12
Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Penyusunan RAD MDGs	36

Daftar Singkatan

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
Inpres	: Instruksi Presiden
KEK	: Kekurangan Energi Kronis
K/L	: Kementerian/Lembaga
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MDGs	: <i>Millennium Development Goals</i>
Perpres	: Peraturan Presiden
PNPM	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
PONED	: Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar
PONEK	: Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif
PP	: Peraturan Pemerintah
PPN	: Perencanaan Pembangunan Nasional
PUG	: Pengarusutamaan Gender
RAD	: Rencana Aksi Daerah
RAD MDGs	: Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah
RAPBN	: Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Nasional
RENJA	: Rencana Kerja
RENSTRA	: Rencana Strategis
RENSTRA RKPD	: Rencana Strategis RKPD
RKA-SKPD	: Rencana Kerja Anggaran SKPD
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
STBM	: Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
TKPK	: Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
UMKM	: Usaha Mikro Kecil Menengah
UU	: Undang Undang

1

PENDAHULUAN

BAB 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Millenium Development Goals (MDGs) merupakan komitmen nasional dan global dalam upaya lebih menyejahterakan masyarakat melalui pengurangan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan. 8 (delapan) tujuan (*goals*) menjadi komitmen MDGs mencakup: (1) Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan; (2) Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua; (3) Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; (4) Menurunkan Angka Kematian Anak; (5) Meningkatkan Kesehatan Ibu; (6) Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular lainnya; (7) Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup; dan (8) Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan.

Upaya percepatan pencapaian target MDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Di tingkat nasional, target-target MDGs telah diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dalam bentuk program, indikator maupun target yang terukur serta indikasi dukungannya.

Sebagian besar pencapaian MDGs Indonesia sudah sesuai dengan rencana target yang ditetapkan (*on track*), bahkan beberapa target MDGs 2015 telah tercapai seperti penurunan prevalensi kekurangan gizi dan proporsi penduduk dengan pendapatan per kapita (lihat Lampiran 2). Namun demikian, masih ada beberapa target MDGs yang memerlukan upaya keras untuk mencapainya. Data capaian target MDGs untuk masing-masing provinsi yang disajikan pada

Lampiran 3 menunjukkan bahwa masih ditemukan disparitas pencapaian di tingkat provinsi. Sehubungan dengan itu, efektivitas program-program yang mendukung pencapaian MDGs di daerah juga perlu ditingkatkan.

Untuk mempercepat pencapaian target MDGs, Bappenas bersama dengan kementerian/lembaga telah merumuskan peta jalan (*road map*) nasional percepatan pencapaian MDGs. Selanjutnya *roadmap* tersebut perlu dijabarkan oleh daerah dalam bentuk Rencana Aksi Daerah (RAD) MDGs sesuai dengan kondisi dan permasalahan serta kemampuan daerah masing-masing.

Dengan rencana aksi tersebut diharapkan pihak-pihak terkait di provinsi memiliki komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan untuk mencapai target MDGs di daerah.

1.2 Tujuan

Pedoman penyusunan RAD MDGs ditujukan untuk memberikan panduan bagi daerah, khususnya provinsi untuk menyusun dokumen rencana aksi percepatan pencapaian target MDGs di daerah, sehingga dapat dihasilkan suatu produk dokumen rencana aksi yang jelas, operasional dan selaras dengan kebijakan nasional.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari pedoman ini meliputi penjelasan tentang :

1. Keterkaitan MDGs dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah;
2. Panduan pengorganisasian;
3. Langkah teknis dan jadwal penyusunan RAD MDGs;
4. Panduan penyusunan matrik RAD MDGs.

1.4 Landasan Hukum

1. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).**
 - a. **Pasal 4 ayat (2)** : RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi,

dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;

- b. **Pasal 5 ayat (2)** : RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penguatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah

Dalam kedudukan sebagai wakil Pemerintah, gubernur memiliki tugas dan wewenang : a) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota; b) koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/kota; dan c) koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota. Di samping pelaksanaan tugas tersebut gubernur sebagai wakil Pemerintah mempunyai tugas : a) menjaga kehidupan berbangsa, bernegara dalam rangka memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b) menjaga dan mengamalkan ideologi Pancasila dan kehidupan demokrasi; c) memelihara stabilitas politik; dan d) menjaga etika dan norma penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014

Pasal 2 ayat 3 : RPJM Nasional berfungsi sebagai:

- a. Pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;
- b. Bahan penyusunan dan perbaikan RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas pemerintah daerah dalam mencapai sasaran

- Nasional yang termuat dalam RPJM Nasional;
- c. Pedoman Pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah.

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang RKP 2011

Pasal 2 ayat (2) : RKP tahun 2011 berfungsi sebagai:

- a. Pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga tahun 2011;
- b. Acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2011;
- c. Pedoman bagi Pemerintah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2011.

5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010

- a. Instruksi Pertama : “Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka percepatan pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, dengan merujuk pada Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, pelaksanaan Program 100 Hari Kabinet Bersatu Indonesia II, dan hasil Rapat Kerja antara Presiden dengan Para Menteri dan Gubernur pada tanggal 2-3 Februari 2010;
- b. Instruksi Kedua : “Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, berpedoman kepada program-program sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini, yang meliputi program : (a) reformasi birokrasi dan tata kelola; (b) pendidikan; (c) kesehatan; (d) penanggulangan kemiskinan; (e) ketahanan pangan; (f) infrastruktur; (g) iklim investasi dan iklim usaha; (h) energi; (i) lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (j) daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik; (k) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi; (l) prioritas lainnya di bidang politik, hukum, dan keamanan; (m) prioritas lainnya di bidang perekonomian, dan (n) prioritas lainnya di bidang kesejahteraan rakyat.

6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan

- a. Instruksi Pertama : “Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka

pelaksanaan program-program pembangunan yang berkeadilan, sebagaimana termuat dalam Lampiran Instruksi Presiden, yang meliputi :

1. Pro rakyat;
 2. Keadilan untuk semua (*justice for all*);
 3. Pencapaian tujuan pembangunan milenium (*Millenium Development Goals – MDGs*).
- b. Instruksi Kedua poin 3 : Untuk program pencapaian tujuan pembangunan Milenium, memfokuskan pada : (a) program pemberantasan kemiskinan dan kelaparan; (b) program pencapaian pendidikan dasar untuk semua; (c) program pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (d) program penurunan angka kematian anak; (e) program kesehatan ibu; (f) program pengendalian HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya; (g) program penjaminan kelestarian lingkungan hidup; dan (h) program pendukung percepatan pencapaian tujuan milenium.

2

KETERKAITAN MDGs DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

BAB 2

Keterkaitan MDGs dengan Kebijakan Pembangunan

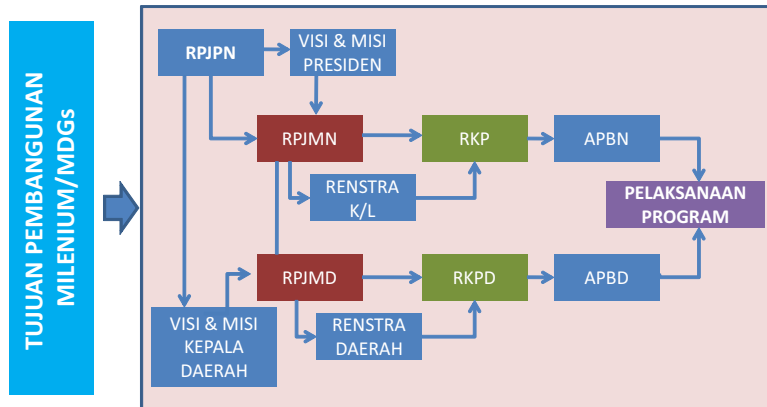
2.1. Keterkaitan MDGs dengan RPJMN

MDGs bukan hanya merupakan pemenuhan komitmen internasional tetapi merupakan penajaman upaya pencapaian sasaran-sasaran pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Untuk itu, MDGs menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan.

RPJMN merupakan dokumen perencanaan untuk jangka menengah (5 tahun) yang menjadi acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L). Selanjutnya, penerapan RPJMN dijabarkan dalam perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Disamping itu, RPJMN juga menjadi acuan bagi penyusunan perencanaan pembangunan di daerah.

RPJMN tahun 2010-2014 merupakan paruh waktu kedua sejak tahun 2000 bagi upaya pencapaian tujuan MDGs pada tahun 2015 dan merupakan kesempatan terakhir (*last shot*) bagi percepatan pencapaian tujuan MDGs secara sistematis. Pengarusutamaan pencapaian tujuan MDGs ke dalam RPJMN tahun 2010-2014 dan RKP, telah dilakukan dalam bentuk rumusan kebijakan, penetapan program/kegiatan, sasaran, indikator dan target terukur serta jaminan penyediaan sumber pembiayaannya. Gambaran umum internalisasi MDGs dalam pembangunan nasional dapat dilihat lebih lanjut dalam Gambar 1.

Gambar 1.
Integrasi
MDGs dalam
Dokumen
Perencanaan
Pembangunan



2.2. Keterkaitan MDGs dengan Rencana Pembangunan Daerah

Sejalan dengan rencana pembangunan nasional, pengarusutamaan MDGs juga harus dilakukan dalam proses perencanaan di tingkat daerah. Pengarusutamaan MDGs dalam pembangunan daerah diarahkan untuk dapat menjawab permasalahan kesejahteraan masyarakat serta mengakomodasi nilai-nilai lokal dan karakteristik masing-masing daerah.

Dengan mengacu pada RPJMN, target dan indikator MDGs diadaptasi dalam rencana pembangunan daerah, yaitu RPJMD dan Renstra SKPD. Berbagai langkah yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi antara lain adalah:

- (1) Bagi Pemerintah Provinsi yang telah menyusun RPJMD, pencapaian target MDGs tingkat nasional dilakukan dengan mengarahkan dan menetapkan berbagai program dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran, indikator kinerja dan pembiayaan ke dalam RKPD. Selain itu, Pemerintah Provinsi juga mengarahkan dan memastikan bahwa penyusunan Renja SKPD dan RKA-SKPD memuat program, kegiatan, sasaran dan indikator kinerja yang mendukung pencapaian MDGs.
- (2) Bagi Pemerintah Provinsi yang sedang menyusun RPJMD, pencapaian target MDGs tingkat daerah dilakukan dengan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang terukur disertai dengan capaian, indikator kinerja dan pendanaan untuk setiap program ke dalam dokumen RPJMD. Selain itu, Pemerintah Provinsi juga mengarahkan penyusunan Renstra SKPD agar memuat kebijakan, program dan kegiatan yang terukur dalam mendukung pencapaian MDGs dan dilengkapi dengan capaian, indikator kinerja dan pendanaan untuk setiap program

dan kegiatan. Pemerintah Provinsi juga mengarahkan dan memastikan bahwa penyusunan Renja SKPD dan RKA-SKPD memuat program, kegiatan, sasaran dan indikator kinerja yang mendukung pencapaian MDGs. Melalui cara ini pencapaian target MDGs tingkat nasional dapat diwujudkan.

- (3) Pemerintah Provinsi hendaknya juga memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyusun RPJMD Kabupaten/Kota dan RKPD Kabupaten/Kota agar setiap kebijakan, program dan kegiatan SKPD Kabupaten/Kota benar-benar mendukung pencapaian MDGs tingkat provinsi.

2.3. Kebijakan RPJMN 2010-2014 Terkait Percepatan Pencapaian Target MDGs

1. Kebijakan dan Strategi Penurunan Kemiskinan dan Kelaparan

1.1. Kebijakan dan Strategi Penurunan Kemiskinan (Tujuan 1A) diarahkan untuk:

- a. Meningkatkan pertumbuhan pada sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja dan efektif menurunkan kemiskinan;
- b. Melengkapi dan menyempurnakan kebijakan penanggulangan kemiskinan, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat miskin, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan penurunan kemiskinan di daerah.

1.2. Kebijakan dan Strategi dalam Menciptakan Kesempatan Kerja Penuh dan Produktif dan Pekerjaan yang Layak untuk Semua, termasuk Perempuan dan Kaum Muda (Tujuan 1B) diarahkan untuk: (a) menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya melalui investasi dan perluasan usaha; (b) memperbaiki kondisi dan mekanisme hubungan industrial untuk mendorong kesempatan berusaha dan kesempatan kerja; (c) menciptakan kesempatan kerja melalui program-program pemerintah; (d) meningkatkan kualitas pekerja; (e) meningkatkan produktivitas pekerja pertanian; (f) mengembangkan jaminan sosial dan memberdayakan pekerja; (g) menerapkan peraturan ketenagakerjaan utama. Upaya penciptaan kesempatan kerja formal seluas-luasnya ini dilaksanakan oleh berbagai kementerian/lembaga, serta didukung oleh pemerintah

provinsi, pemerintah kabupaten/kota, sektor perbankan, dunia usaha, dan masyarakat.

- 1.3. Kebijakan dan Strategi Penurunan Prevalensi Kekurangan Gizi pada Balita (Tujuan 1C)**, melalui: perbaikan status gizi masyarakat dengan meningkatkan: (a) asupan zat gizi makro (karbohidrat, protein, dan lemak) dan zat gizi mikro (kapsul Vitamin A, zat besi (Fe), garam beryodium, dan zat gizi mikro lainnya) untuk memenuhi angka kecukupan gizi; (b) survailans pangan dan gizi; (c) pengetahuan masyarakat tentang pola hidup sehat dan penerapan gizi seimbang; (d) pemberian ASI eksklusif sampai enam bulan; (e) pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) mulai dari bayi usia 6–24 bulan dan makanan bagi ibu hamil KEK; (f) pemantauan pertumbuhan bayi dengan prioritas usia dua tahun pertama; (g) kegiatan gizi berbasis masyarakat melalui posyandu dan keluarga sadar gizi; (h) fortifikasi; (i) pemberian makanan pemulihan balita gizi-kurang; (j) penanggulangan gizi darurat; (k) tatalaksana penanganan gizi buruk anak balita (0–59 bulan); dan (l) peningkatan jumlah, kualitas, dan penyebaran tenaga gizi.

- 2. Kebijakan dan Strategi Pencapaian Pendidikan Dasar untuk Semua (Tujuan 2)**, melalui: (a) penyelenggaraan pendidikan dasar bermutu dan terjangkau; (b) pemantapan/rasionalisasi implementasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS); (c) penurunan angka putus sekolah dan angka mengulang kelas, peningkatan angka melanjutkan, serta penurunan rata-rata lama penyelesaian pendidikan di berbagai jenjang; (d) penuntasan rehabilitasi ruang kelas SD/MI/ sederajat untuk memenuhi standar pelayanan minimal; (e) peningkatan kesempatan lulusan SD/MI/ sederajat yang berasal dari keluarga miskin untuk dapat melanjutkan ke SMP/MTs/ sederajat; (f) peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi, evaluasi, pelatihan, pendidikan, dan penyediaan berbagai tunjangan guru; (g) penguatan kemampuan guru, termasuk kepala sekolah dan pengawas sekolah, dalam menjalankan paradigma pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, entrepreneurial, dan menyenangkan; (h) peningkatan kompetensi guru melalui pengembangan profesional berkelanjutan (*continuous professional development*); (i) peningkatan efisiensi, efektivitas, pengelolaan, dan pemerataan distribusi guru; (j) penyediaan tenaga pendidik di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan sesuai dengan standar pelayanan minimal; (k) peningkatan keberaksaraan penduduk

yang diikuti dengan upaya pelestarian kemampuan keberaksaraan dan peningkatan minat baca; (l) peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, antara lain, dalam bentuk komite sekolah; (m) peningkatan kapasitas pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat pelaksanaan desentralisasi pendidikan termasuk di antaranya dalam bentuk dewan pendidikan di tingkat kabupaten/kota; serta (n) peningkatan kapasitas satuan pendidikan untuk mengoptimalkan pelaksanaan otonomi pendidikan, termasuk manajemen berbasis sekolah (MBS).

3. Kebijakan Peningkatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan(Tujuan3),diarahkan pada:(1)peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, melalui harmonisasi peraturan

perundangan dan pelaksanaannya di semua tingkat pemerintahan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan; (2) perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, melalui upaya-upaya pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan; dan (3) peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan melalui penerapan strategi PUG, termasuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di seluruh kementerian dan lembaga.

Dalam rangka mencapai arah kebijakan tersebut, maka strategi untuk meningkatkan kesetaraan gender meliputi empat bidang, yaitu:

a. Bidang pendidikan, melalui:

- Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dalam rangka mengurangi kesenjangan taraf pendidikan antarwilayah, gender, dan antartingkat sosial ekonomi;
- Peningkatan akses dan kualitas pendidikan nonformal yang responsif gender.

b. Bidang ketenagakerjaan, melalui:

- Pengutamaan penegakan hukum yang ada untuk memastikan bahwa laki-laki dan perempuan mampu berpartisipasi tanpa diskriminasi dalam angkatan kerja;
- Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terutama dalam penegakan undang-undang dan peraturan

- ketenagakerjaan;
- Penguatan pengawasan ketenagakerjaan untuk memastikan terlaksananya pengawasan dan penegakan aturan ketenagakerjaan (*core labor standards*) dengan lebih baik;
- Pengupayaan perlindungan sosial bagi kelompok perempuan yang bekerja di kegiatan ekonomi informal;
- Peningkatan kualitas pekerja dan calon tenaga kerja perempuan.
- c. Bidang politik, melalui peningkatan pendidikan dan partisipasi politik untuk perempuan.
- d. Pelaksanaan pengarusutamaan gender pada penyelenggaraan pemerintah daerah, melalui pengembangan pedoman umum untuk SKPD dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses perencanaan, implementasi, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi dari kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di tingkat lokal, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

4. Kebijakan dan Strategi Penurunan Kematian Anak (Tujuan 4), melalui

: (a) peningkatan cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani; (b) peningkatan cakupan kunjungan bayi; (c) peningkatan cakupan imunisasi tepat waktu pada bayi dan balita; (d) perbaikan kesehatan dan gizi ibu hamil; (e) pemberian ASI eksklusif sampai enam bulan; (f) peningkatan peran posyandu dalam rangka peningkatan kesehatan anak; (g) penyediaan tenaga pelayanan kesehatan bayi dan balita (dokter, bidan dan kader); dan (h) perbaikan kualitas lingkungan dalam rangka penurunan faktor risiko kesehatan bagi bayi dan balita.

5. Kebijakan dan Strategi Peningkatan Kesehatan Ibu (Tujuan 5), melalui:

(a) peningkatan pelayanan *continuum care* kesehatan ibu dan anak; (b) penyediaan sarana kesehatan yang mampu melaksanakan PONED dan PONEK; (c) peningkatan pertolongan persalinan oleh tenaga terlatih; (d) peningkatan cakupan kunjungan ibu hamil (K1 dan K4); (e) peningkatan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani; (f) peningkatan cakupan penanganan komplikasi kebidanan pelayanan nifas; (g) peningkatan cakupan peserta KB aktif yang dilayani sektor pemerintah; (h) pemberian makanan pemulihan pada ibu hamil KEK; (i) pembinaan dan peningkatan kemandirian keluarga berencana; dan (j) promosi dan penggerakan masyarakat.

6. Kebijakan dan Strategi Pengendalian Penyakit Menular (Tujuan 6), melalui: (a) peningkatan kemampuan pencegahan dan penanggulangan faktor risiko, termasuk imunisasi; (b) penguatan survailans epidemiologi dalam rangka mengembangkan sistem kewaspadaan dini dengan didukung oleh peningkatan jumlah dan kualitas tenaga survailans; (c) penguatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); (d) penguatan penemuan penderita dan tata laksana kasus; (e) peningkatan upaya menuju eliminasi penyakit-penyakit terabaikan; (f) penguatan sistem pengendalian zoonosis secara terpadu; dan (g) promosi dan pemberdayaan masyarakat.

7. Kebijakan dan Strategi dalam Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup (Tujuan 7), melalui: (a) memantapkan status hukum dan peningkatan kapasitas pengelolaan kawasan hutan; (b) memantapkan kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya hutan; (c) memelihara dan meningkatkan daya dukung dan fungsi lingkungan; (d) memantapkan fungsi konservasi alam dengan peningkatan kualitas pengelolaan Taman Nasional dan Kawasan Konservasi lainnya, pemanfaatan keanekaragaman hayati dan tumbuhan dan satwa liar (TSL); (e) meningkatkan perlindungan hutan melalui kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta meningkatkan perlindungan dan pengamanan hutan dari berbagai ancaman (*illegal logging*, perambahan, perdagangan TSL ilegal); (f) meningkatkan kapasitas pengelolaan kawasan konservasi melalui peningkatan kelembagaan pengelola kawasan konservasi, kemandirian dan produktivitas, (g) mendorong pemanfaatan panas bumi untuk pembangkit tenaga listrik skala menengah dan besar; (h) mendorong pemanfaatan bahan bakar nabati, dengan penanamannya pada wilayah-wilayah yang memiliki lahan tidak terpakai namun luas dan memiliki potensi produksi pertanian yang tinggi; (i) pengendalian dan pemantauan pencemaran pada air, lahan, udara, dan keanekaragaman hayati (kehati); (j) perbaikan kualitas lingkungan melalui upaya rehabilitasi dan konservasi serta pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan; (k) peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan institusi pengelola lingkungan hidup; (l) pengembangan penelitian pengelolaan lingkungan; (m) pengembangan sumber-sumber pendanaan lingkungan alternatif; (n) mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan untuk pembangunan; (o) meningkatkan fungsi laut sebagai sistem penyangga kehidupan dan penyedia pangan dunia; (p) meningkatkan pemahaman

masyarakat mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS); (q) meningkatkan prioritas pembangunan, sistem perencanaan, pengembangan alternatif sumber pendanaan dan kinerja manajemen pembangunan air minum dan sanitasi; (r) melengkapi perangkat peraturan di tingkat pusat dan/atau daerah untuk mendukung pelayanan air minum dan sanitasi; (s) memastikan ketersediaan air baku air minum; (t) meningkatkan penyediaan hunian layak dan terjangkau yang didukung oleh ketersediaan prasarana sarana dasar permukiman.

3

LANGKAH TEKNIS DAN JADWAL PENYUSUNAN RAD MDGs

BAB 3

Langkah Teknis dan Jadwal Penyusunan RAD MDGs

3.1. Dokumen yang Perlu Diperhatikan dalam Penyusunan RAD MDGs

Penyusunan RAD MDGs perlu mengacu pada beberapa dokumen yang terkait, antara lain :

1. RPJMN Tahun 2010-2014

Dokumen RPJMN 2010-2014 diperlukan dalam penyusunan program dan kegiatan serta tindakan prioritas yang dilakukan terkait dengan percepatan pencapaian target MDGs. Dokumen tersebut juga telah selaras dengan target pencapaian MDGs.

2. Renstra Kementerian/Lembaga Tahun 2010-2014

Dokumen Renstra K/L tahun 2010-2014 yang terkait langsung dengan MDGs diperlukan dalam penyusunan program dan kegiatan serta tindakan yang dilakukan dengan percepatan pencapaian target MDGs. Program, kegiatan dan tindakan yang ada dalam Renstra bersifat lebih teknis dan rinci bila dibandingkan dengan RPJMN tahun 2010-2014. Dokumen tersebut juga telah selaras dengan target pembangunan dalam RPJMN tahun 2010-2014.

3. RKP Tahun 2011

Dokumen RKP tahun 2011 diperlukan dalam penetapan indikator, target, dan anggaran tahun 2011. Perbaikan target dan anggaran tahun 2011 dalam RPJMN 2010-2014 diakomodasi dalam RKP tahun 2011 termasuk di dalamnya perbaikan indikator, target, dan anggaran terkait pencapaian target MDGs.

4. Inpres No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan

Dokumen Inpres No. 3 Tahun 2010 diperlukan sebagai dasar hukum dalam penyusunan RAD MDGs.

5. Peta Jalan (*Road Map*) Nasional Percepatan Pencapaian Target MDGs

Peta Jalan Nasional Percepatan Pencapaian target MDGs adalah dokumen yang menelaah kemajuan, menganalisis kecenderungan dan tantangan, serta mengkaji kebijakan dan kegiatan pokok untuk pencapaian MDGs. Peta jalan MDGs ini, mengacu pada RPJMN tahun 2010-2014 sebagai penjabaran dari Visi-Misi, dan Program Pemerintah, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN tahun 2005-2025.

6. Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2010

Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2010 merupakan laporan yang secara rinci menguraikan pencapaian sasaran pembangunan, sesuai dengan indikator MDGs sampai dengan posisi tahun 2010. Berdasarkan capaian tersebut, laporan ini menguraikan secara sekilas tantangan yang dihadapi serta upaya-upaya yang diperlukan untuk mencapai berbagai sasaran MDGs, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun kegiatan yang diperlukan agar sasaran MDGs pada tahun 2015 dapat tercapai.

7. Dokumen Kebijakan Lain yang Terkait

Beberapa K/L mengembangkan kebijakan terkait percepatan pencapaian target MDGs baik dalam bentuk UU, Inpres, dokumen rancang bangun maupun dokumen rencana aksi. Kebijakan tersebut diperlukan sebagai dasar hukum dalam penyusunan RAD dan rujukan dalam penetapan program dan kegiatan dalam Percepatan Pencapaian Target MDGs. Beberapa dokumen kebijakan lain yang terkait tersebut seperti pada lampiran 4.

8. RPJMD

Dokumen RPJMD diperlukan dalam penyusunan RAD MDGs terutama kebijakan daerah yang relevan dan mendukung pencapaian target MDGs di masing-masing daerah.

3.2. Langkah-langkah Teknis Penyusunan RAD MDGs

Penyusunan RAD MDGs dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- Langkah 1 : Penetapan Tim Pengarah dan Kelompok Kerja (Pokja). Tim dapat menggunakan struktur yang ada atau membentuk yang baru, Tim beranggotakan Bappeda kabupaten;
- Langkah 2 : Melakukan sidang pleno pertama untuk membahas langkah-langkah penyusunan RAD;
- Langkah 3 : Masing-masing pokja menyusun draft RAD, dengan tahapan:
1. Identifikasi tujuan, target dan indikator MDGs untuk masing-masing provinsi;
 2. Menetapkan program dan kegiatan/tindakan prioritas terkait dengan pencapaian masing-masing target MDGs;
 3. Menetapkan indikator dan target pencapaiannya terkait dengan kegiatan/tindakan yang dilakukan dalam pencapaian masing-masing target MDGs;
 4. Menetapkan alokasi anggaran yang dibutuhkan dan sumber pendanaan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan tindakan yang dilakukan.
- Langkah 4 : Melaksanakan Sidang Pleno Kedua antarpokja dengan menyajikan draft RAD (narasi dan matrik) untuk dibahas secara lintaspokja (workshop);
- Langkah 5 : Penyempurnaan dan finalisasi Draft RAD berdasarkan masukan hasil Sidang Pleno Kedua;
- Langkah 6 : Review draft RAD MDGs oleh tim MDGs pusat;
- Langkah 7 : Pengesahan RAD MDGs dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah;
- Langkah 8 : Sosialisasi RAD kepada seluruh pemangku kepentingan.

Proses penyusunan RAD MDGs akan difasilitasi oleh Tim MDGs pusat.

3.3. Pembiayaan

Seluruh kebutuhan pembiayaan dalam rangka proses penyiapan dan pelaksanaan RAD MDGs menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.

3.4. Jadwal Penyusunan RAD MDGs

Tabel 1.
Jadwal
Penyusunan
RAD MDGs

No.	Kegiatan	Bulan Pada Tahun 2011											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pembentukan Tim Pengarah dan Kelompok Kerja (Pokja)	√											
2	Sidang Pleno Persiapan Penyusunan Draft RAD oleh Masing-masing Pokja*) (Workshop I)		√										
3	Penyusunan Draft RAD oleh Masing-masing Pokja (provinsi dan kabupaten/kota)			√	√	√	√						
4	Sidang Pleno Pembahasan RAD Hasil Masing-masing Pokja*) (Workshop II)				√	√	√	√					
5	Penyempurnaan Draft RAD MDGs oleh Masing-masing Pokja							√					
6	Review Draft RAD MDGs provinsi oleh Tim MDGs Pusat							√	√	√			
7	Pengesahan RAD MDGs oleh Kepala Daerah									√	√		
8	Sosialisasi RAD MDGs										√	√	√

*) dengan mengundang Bappeda dan SKPD terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota

4

SISTEMATIKA RAD MDGs

BAB 4

Sistematika RAD MDGs

4.1. Sistematika Dokumen RAD MDGs

Dokumen RAD MDGs akan berisi :

BAB I Pendahuluan

1.1 Kondisi Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Daerah

1.2 Permasalahan dan Tantangan

BAB II Arah Kebijakan dan Strategi Percepatan Pencapaian Target MDGs

BAB III Pemantauan dan Evaluasi

BAB IV Penutup

Lampiran

Matrik Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target MDGs

Penjelasan penulisan :

1. BAB I Pendahuluan

1.1. Kondisi Umum Pembangunan Daerah berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Milenium

Pada bagian ini dijelaskan status capaian dari berbagai indikator terkait MDGs pada provinsi yang bersangkutan mulai *goal* 1 sampai dengan *goal* 7.

1.2. Permasalahan dan Tantangan

Pada bagian ini dijelaskan secara umum permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan berbagai kebijakan yang terkait dengan pencapaian target MDGs.

2. BAB II Arah Kebijakan dan Strategi Percepatan Pencapaian Target MDGs

Pada bagian ini dijelaskan arah kebijakan dan strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target MDGs. Dituliskan strategi umum yang dilakukan untuk masing-masing tujuan (*goal*) sebagai payung kegiatan yang dicontohkan dalam matrik. Strategi dirumuskan mengacu pada kegiatan nasional sebagaimana dituliskan dalam peta jalan (*roadmap*) nasional percepatan pencapaian MDGs dan RPJMD. Uraian kebijakan dan strategi dilengkapi dengan program, lintasprogram dan indikator kinerja *output* untuk masing-masing kegiatan dalam program tersebut.

3. BAB III Pemantauan dan Evaluasi

Pada bagian ini disusun mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk melihat target capaian dari pelaksanaan RAD MDGs untuk masing-masing *goal* (tujuan).

Mekanisme pemantauan dan evaluasi RAD MDGs perlu menggambarkan :

- a. Tanggungjawab masing-masing SKPD sesuai tujuan MDGs-nya;
- b. Waktu pelaksanaan;
- c. Langkah tindak lanjut;

Koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi RAD MDGs dilakukan oleh Kepala Bappeda.

4. BAB IV Penutup

Pada bagian ini diisi hal-hal yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan dalam rangka mendukung RAD MDGs, termasuk menggalang partisipasi dari berbagai pihak.

4.2. Matriks RAD MDGs dan Penjelasannya

RAD MDGs dituliskan dalam matriks berikut :

Tabel 2.

Matrik Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target MDGs

TUJUAN 1 : Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan

Program/ Kegiatan/ Tindakan	Indikator	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
TARGET 1C : Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015													
Indikator MDGs :	1. Prevalensi balita kekurangan gizi												
	2. Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum												
Nasional													
Program 1 : Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak													
Kegiatan 1 : Pembinaan Gizi Masyarakat	1. Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100	100	100	100	-	536,0	564,0	643,0	668,0	-	APBN	Kementerian Kesehatan
	2. Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)	70	75	80	85	-							
Daerah													
Kegiatan 1													
Kegiatan 2													
dst													

Petunjuk Umum Pengisian Matrik RAD MDGs

1. Matrik ini berlaku untuk setiap *goal*/dalam MDGs sepanjang target bersifat kuantitatif dan pencapaiannya secara nasional merupakan akumulasi dari pencapaian masing-masing provinsi. Untuk target yang tidak dapat dirumuskan secara kuantitatif dapat menggunakan target yang bersifat kualitatif dan dapat dituangkan dalam matrik yang disesuaikan atau dapat ditulis secara naratif.
2. Menu kegiatan daerah telah disiapkan oleh pusat (K/L terkait) sesuai tanggung jawab *goal*-nya masing-masing sebagai acuan penyusunan RAD masing-masing provinsi. Menu kegiatan tersebut bersifat operasional dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan daerah sepanjang memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian target nasional maupun target MDGs.
3. Matrik yang telah dilengkapi dengan menu kegiatan daerah akan disampaikan pada saat sosialisasi dan fasilitasi Pedoman Penyusunan RAD MDGs.
4. Cara Pengisian Matrik
 - a. **Bagian 1 :**
Diisi dengan target dan indikator MDGs sesuai tujuan/*goal* terkait.
 - a. **Bagian 2 :**
 - Diisi dengan program, kegiatan, indikator, target pencapaian dan alokasi anggaran tahunan sesuai tujuan, target dan indikator MDGs terkait, mengacu pada RPJMN 2010-2014 dan/atau RKP 2011;
 - Kolom sumber pendanaan : diisi dengan sumber pembiayaan (APBN);
 - Kolom Pelaksana : diisi dengan K/L penanggung jawab kegiatan.
 - b. **Bagian 3 :**
 - Diisi dengan kegiatan, indikator, target pencapaian dan alokasi anggaran tahunan dalam rangka mendukung pencapaian target nasional dan target MDGs terkait yang mengacu pada RPJMD;
 - Kolom program/kegiatan : diisi dengan program dan kegiatan

yang sesuai dengan pencapaian target nasional dan MDGs;

- Kolom Indikator : diisi dengan satuan target masing-masing kegiatan (jumlah, persentase atau yang bersifat kuantitatif);
- Kolom target pencapaian : diisi dengan target rencana tahunan capaian masing-masing indikator kegiatan;
- Kolom alokasi anggaran : diisi dengan rencana pembiayaan tahunan untuk masing-masing kegiatan;
- Kolom sumber pendanaan : diisi dengan sumber biaya untuk kegiatan untuk kegiatan pencapaian target MDGs yang berasal dari APBN (dana Dekon, TP, DAK, DAU) dan/atau APBD (PAD), dan/atau sumber lainnya;
- Kolom pelaksana : diisi dengan SKPD terkait pelaksana kegiatan.

5

PENGORGANISASIAN PENYUSUNAN RAD MDGs

BAB 5

Pengorganisasian Penyusunan RAD MDGs

5.1. Pengorganisasian

Organisasi penyusunan RAD MDGs terdiri dari Tim Pengarah dan Kelompok Kerja untuk masing-masing bidang, dengan tugas dan susunan anggota sebagai berikut :

1. Tim Pengarah

Tim Pengarah terdiri dari unsur pimpinan daerah yang memberikan arahan terhadap penyusunan RAD.

Susunan Tim Pengarah terdiri atas :

- Penanggung Jawab : Kepala Daerah
- Sekretaris : Kepala Bappeda
- Anggota : Kepala Dinas Teknis Terkait

2. Kelompok Kerja

Kelompok Kerja merupakan tim teknis yang bertanggung jawab dalam proses penyusunan RAD. Organisasi masing-masing kelompok Kerja terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota.

Kelompok Kerja RAD terdiri dari :

- Pokja I : Penanggulangan Kemiskinan
- Pokja II : Pendidikan dan Gender
- Pokja III : Kesehatan dan Gizi
- Pokja IV : Kelestarian Lingkungan Hidup

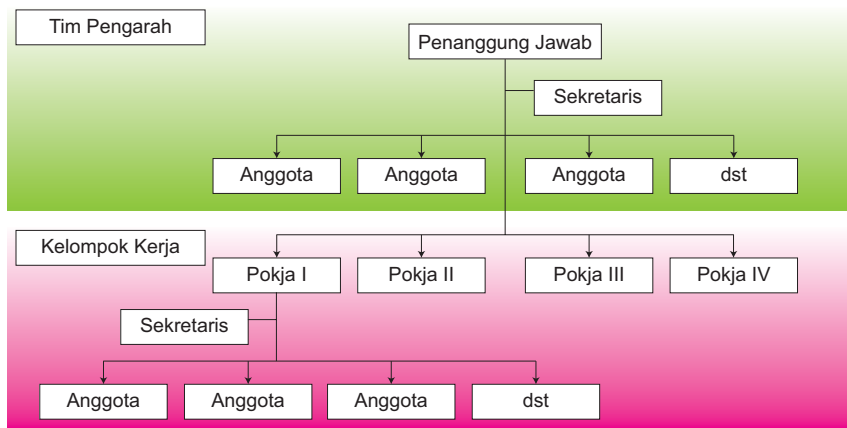
Pembentukan pokja dimaksudkan untuk memudahkan dalam proses pembahasan RAD MDGs. Namun demikian pembentukan pokja bukan

merupakan keharusan sepanjang di provinsi yang bersangkutan sudah memiliki pokja terkait.

Tabel 3.
Organisasi
dan Tanggung
Jawab Pokja
Penyusunan
RAD MDGs

Nama Pokja	Tanggung Jawab Per Tujuan MDGs	ORGANISASI POKJA (Indikatif)
POKJA I Penanggulangan Kemiskinan	Tujuan 1	- Ketua: Kepala Bappeda/BPMD - Sekretaris: Kepala Dinas Terkait - Anggota: Kepala Dinas/Instansi terkait (Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, Lembaga Riset, Kantor Statistik Provinsi, LSM)
POKJA II Pendidikan dan Gender	Tujuan 2 Tujuan 3	- Ketua: Kepala Dinas Pendidikan - Sekretaris: Kepala Bidang Bappeda terkait - Anggota: Kepala Dinas/Instansi terkait (Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, Lembaga Riset, Kantor Statistik Provinsi, LSM)
POKJA III Kesehatan dan Gizi	Tujuan 1, Tujuan 4, Tujuan 5, Tujuan 6, Tujuan 7	- Ketua: Kepala Dinas Kesehatan - Sekretaris: Kepala Bidang Bappeda terkait - Anggota: Kepala Dinas/Instansi terkait (Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, Lembaga Riset, Kantor Statistik Provinsi, LSM)
POKJA IV Kelestarian Lingkungan Hidup	Tujuan 7	- Ketua: Kepala Dinas Pekerjaan Umum - Sekretaris: Kepala Bidang Bappeda terkait - Anggota: Kepala Dinas/Instansi terkait (Badan Lingkungan Hidup Daerah/BLHD, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, Lembaga Riset, Kantor Statistik Provinsi, LSM)

Gambar 2.
Bagan
Struktur
Organisasi
Penyusunan
RAD MDGs



5.2. Uraian Tugas

1. Tim pengarah :
 - a. memberikan arahan dalam pelaksanaan koordinasi penyusunan pedoman RAD MDGs;
 - b. memberikan arahan dan masukan kepada tim teknis (Kelompok Kerja) mengenai substansi penyusunan pedoman RAD MDGs;
 - c. memberikan arahan mengenai kebijakan yang diharapkan dalam menyusun rekomendasi untuk penyusunan pedoman RAD MDGs;
 - d. menyampaikan laporan kegiatan penyusunan pedoman RAD MDGs kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas;
2. Kelompok Kerja :
 - b. bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan RAD MDGs sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan kelompok kerja MDGs sesuai dengan bidang tugasnya;
 - d. melakukan pencarian, pengumpulan bahan, data dan informasi yang dibutuhkan termasuk melakukan studi kepustakaan dan wawancara kepada pihak terkait dalam rangka penyusunan RAD MDGs;
 - e. melakukan analisa situasi perkembangan pencapaian MDGs di tingkat provinsi dan upaya-upaya yang telah dilakukan;
 - f. melakukan identifikasi faktor-faktor penentu pencapaian MDGs sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. menyusun RAD MDGs sesuai dengan sistematika dan diserahkan kepada sekretariat tim pengarah untuk dikonsolidasikan dengan hasil pokja lainnya;
 - h. sosialisasi RAD MDGs kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah.

5.3. Mekanisme Kerja

1. Tim pengarah mengadakan rapat sesuai keperluan selama penyusunan RAD MDGs;
2. Pokja mengadakan rapat sesuai dengan keperluan selama penyusunan RAD MDGs;

3. Kepala Bappeda sebagai sekretaris tim pengarah bertugas untuk mengkonsolidasikan RAD MDGs hasil pokja;
4. Draft yang sudah disusun oleh tim MDGs di tingkat provinsi akan dikonsultasikan dengan tim MDGs di tingkat pusat sebelum ditetapkan oleh Gubernur.

6

PENUTUP

BAB 6

Penutup

Pedoman penyusunan RAD MDGs merupakan panduan bagi setiap pimpinan daerah untuk menghasilkan rancangan RAD MDGs yang selaras dengan kebijakan nasional dan daerah. Pedoman ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas yang mengatur Pedoman Penyusunan RAD MDGs. Dengan pedoman ini diharapkan daerah dapat menyusun Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Target MDGs dengan standar kualitas yang baik dan dapat memudahkan dalam proses monitoring dan evaluasinya.

LAMPIRAN

- 1. List Indikator MDGs**
- 2. Pencapaian Indikator MDGs Nasional**
- 3. Profil Pencapaian MDGs Provinsi**
- 4. Dokumen Kebijakan Lainnya yang Perlu diperhatikan dalam Penyusunan RAD MDGs**
- 5. Contoh matrik masing-masing target MDGs**
 - a. Matrik Tujuan 1 (menanggulangi kemiskinan dan kelaparan)
 - b. Matrik Tujuan 2 (mencapai pendidikan dasar untuk semua)
 - c. Matrik Tujuan 3 (mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan)
 - d. Matrik Tujuan 4 (meningkatkan kesehatan anak)
 - e. Matrik Tujuan 5 (menurunkan angka kematian ibu)
 - f. Matrik Tujuan 6 (memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya)
 - g. Matrik Tujuan 7 (memastikan kelestarian lingkungan hidup)

Lampiran 1 :
List Indikator MDGs

Tujuan dan Target (diambil dari Deklarasi Milenium)	Indikator capaian yang dimonitor
Tujuan 1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan	
Target 1A: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari US\$ 1 (PPP) per hari dalam kurun waktu 1990-2015	1.1 Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari US\$ 1,00 (PPP) per kapita per hari 1.2 Rasio kesenjangan kemiskinan 1.3 Proporsi kuintil termiskin dalam konsumsi nasional
Target 1B: Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda	1.4 Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja 1.5 Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas 1.7 Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja
Target 1C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015	1.8 Prevalensi balita dengan berat badan rendah / kekurangan gizi 1.9 Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum
Tujuan 2: Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua	
Target 2A: Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar	2.1 Angka Partisipasi Murni (APM) sekolah dasar 2.2 Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar 2.3 Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki
Tujuan 3: Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	
Target 3A: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015	3.1 Rasio perempuan terhadap laki-laki di tingkat pendidikan dasar, menengah dan tinggi 3.2 Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non-pertanian 3.3 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR
Tujuan 4: Menurunkan Angka Kematian Anak	
Target 4A: Menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) hingga dua per tiga dalam kurun waktu 1990-2015	4.1 Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup 4.2 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup 4.3 Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak

Tujuan dan Target (diambil dari Deklarasi Milenium)	Indikator capaian yang dimonitor
Tujuan 5: Meningkatkan Kesehatan Ibu	
Target 5A: Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990-2015	5.1 Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup 5.2 Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih
Target 5B: Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015	5.3 Angka pemakaian kontrasepsi /CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 (semua cara dan cara modern) 5.4 Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun 5.5 Cakupan pelayanan Antenatal (sedikitnya satu kali kunjungan dan empat kali kunjungan) 5.6 Unmet Need (kebutuhan keluarga berencana/KB yang tidak terpenuhi)
Tujuan 6: Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya	
Target 6A: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS hingga tahun 2015	6.1 Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi usia 15-24 tahun 6.2 Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir 6.3 Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS
Target 6B: Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010	6.5 Proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan antiretroviral
Target 6C: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya hingga tahun 2015	6.6 Angka kejadian dan tingkat kematian Malaria 6.7 Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida 6.9 Angka kejadian, prevalensi dan tingkat kematian akibat Tuberkulosis 6.10 Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dan diobati dalam program DOTS
Tujuan 7: Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup	
Target 7A: Memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dalam kebijakan dan program nasional serta mengurangi kerusakan pada sumber daya lingkungan	7.1 Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan 7.2 Jumlah emisi karbon dioksida (CO2) 7.3 Jumlah konsumsi bahan perusak ozon (BPO)

Tujuan dan Target (diambil dari Deklarasi Milenium)	Indikator capaian yang dimonitor
Target 7B: Menanggulangi kerusakan keanekaragaman hayati dan mencapai penurunan tingkat kerusakan yang signifikan pada tahun 2010	7.6 Proporsi kawasan lindung dan kawasan lindung perairan
Target 7C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015	7.8 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak 7.9 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar yang layak
Target 7D: Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh (minimal 100 juta) pada tahun 2020	7.10 Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan
Tujuan 8: Mengembangkan Kemitraan Global untuk Pembangunan	
Target 8A: Mengembangkan sistem keuangan dan perdagangan yang terbuka, berbasis peraturan, dapat diprediksi dan tidak diskriminatif Meliputi komitmen pada tata pemerintahan yang baik, pembangunan, dan penanggulangan kemiskinan – baik di tingkat Nasional maupun Internasional	8.1 Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB 8.2 Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum 8.3 Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR
Target 8D: Menangani utang negara berkembang melalui upaya nasional maupun internasional untuk dapat mengelola utang dalam jangka panjang	8.12 Rasio pembayaran pokok utang dan bunga utang luar negeri terhadap penerimaan hasil ekspor (DSR)
Target 8F: Bekerjasama dengan swasta dalam memanfaatkan teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi	8.14 Proporsi penduduk yang memiliki jaringan PSTN per 100 penduduk 8.15 Proporsi penduduk yang memiliki telepon seluler per 100 penduduk 8.16 Proporsi rumah tangga dengan akses internet

Lampiran 2 :

Pencapaian Indikator MDGs Nasional

Tinjauan Status Pencapaian Target MDGs

Indikator		Acuan Dasar	Saat Ini	Target MDGs 2015	Status	Sumber
Tujuan 1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan						
Target 1A: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari US\$ 1 (PPP) per hari dalam kurun waktu 1990-2015						
1.1	Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari US\$ 1,00 (PPP) per kapita per hari	20,60% (1990)	5,90% (2008)	10,30%	●	Bank Dunia dan BPS
1.1a	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional	15,10% (1990)	13,33% (2010)	7,55%	▼	Susenas, BPS
1.1b	Persentase penduduk dengan pendapatan kurang dari US\$ 2,00 (PPP) per hari	50,50% (1996)	42,60% (2008)	Berkurang	►	Bank Dunia dan BPS
1.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	2,70% (1990)	2,21% (2010)	Berkurang	►	Susenas, BPS
Target 1B: Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda						
1.4	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	3,52% (1990)	2,24% (2009)	-		
1.5	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	65% (1990)	62% (2009)	Meningkat		Sakernas, BPS Produk Domestik Bruto (PDB nasional BPS)
1.7	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	71% (1990)	64% (2009)	Menurun	►	
Target 1C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015						
1.8	Prevalensi balita dengan berat badan rendah / kekurangan gizi	31,00% (1989)*	18,40% (2007)**	15,50%	►	* Susenas, BPS **Riskesdas 2007,
1.8a	Prevalensi balita gizi buruk	7,20% (1989)*	5,40% (2007)**	3,60%	►	
1.8b	Prevalensi balita gizi kurang	23,80% (1989)*	13,00% (2007)**	11,90%	►	
1.9	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum:				▼	Susenas, BPS
	- 1400 Kkal/kapita/hari	17,00% (1990)	14,47% (2009)	8,50%		
	- 2000 Kkal/kapita/hari	64,21% (1990)	61,86% (2009)	35,32%		

Indikator		Acuan Dasar	Saat Ini	Target MDGs 2015	Status	Sumber
Tujuan 2: Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua						
Target 2A: Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar						
2.1	Angka Partisipasi Murni (APM) sekolah dasar	88,70% (1992)	95,23% (2009)	100,00%	▶	Kemdiknas
2.2.	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	62,00% (1990)*	93,00% (2008)**	100,00%	▶	*Kemdiknas ** Susenas, BPS
2.3	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	96,60% (1990)	99,47% (2009) Perempuan: 99,40% Laki-laki: 99,55%	100,00%	▶	Susenas, BPS
Tujuan 3: Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan						
Target 3A: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015						
3.1	Rasio perempuan terhadap laki-laki di tingkat pendidikan dasar, menengah dan tinggi					
	- Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	100,27 (1993)	99,73 (2009)	100,00	●	Susenas, BPS
	- Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	99,86 (1993)	101,99 (2009)	100,00	●	
	- Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	93,67 (1993)	96,16 (2009)	100,00	▶	
	- Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	74,06 (1993)	102,95 (2009)	100,00	▶	
3.1a	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	98,44 (1993)	99,85 (2009)	100,00	●	
3.2	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non-pertanian	29,24% (1990)	33,45% (2009)	Meningkat	▶	Sakernas, BPS
3.3	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	12,50% (1990)	17,90% (2009)	Meningkat	▶	KPU
Tujuan 4: Menurunkan Angka Kematian Anak						
Target 4A: Menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) hingga dua per tiga dalam kurun waktu 1990-2015						
4.1	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	97 (1991)	44 (2007)	32	▶	SDKI 1991, 2007
4.2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	68 (1991)	34 (2007)	23	▶	
4.2a	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	32 (1991)	19 (2007)	Menurun	▶	
4.3	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	44,50% (1991)	67,00% (2007)	Meningkat	▶	

Indikator	Acuan Dasar	Saat Ini	Target MDGs 2015	Status	Sumber	
Tujuan 5: Meningkatkan Kesehatan Ibu						
Target 5A: Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990-2015						
5.1	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	390 (1991)	228 (2007)	102	▼	SDKI 1993, 2007
5.2	Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih	40,70% (1992)	77,34% (2009)	Meningkat	►	Susenas 1992-2009
Target 5B: Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015						
5.3	Angka pemakaian kontrasepsi /CPR bagi perempuan menikah usia 15-49, semua cara	49,70% (1991)	61,40% (2007)	Meningkat	►	SDKI 1991, 2007
5.3a	Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) pada perempuan menikah usia 15-49 tahun saat ini, cara modern	47,10% (1991)	57,40% (2007)	Meningkat	▼	
5.4	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun	67 (1991)	35 (2007)	Menurun	►	
5.5	Cakupan pelayanan Antenatal (sedikitnya satu kali kunjungan dan empat kali kunjungan)					
	- 1 kunjungan:	75,00%	93,30%	Meningkat	►	
	- 4 kunjungan:	56,00% (1991)	81,50% (2007)		►	
5.6	Unmet Need (kebutuhan keluarga berencana/KB yang tidak terpenuhi)	12,70% (1991)	9,10% (2007)	Menurun	▼	
Tujuan 6: Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya						
Target 6A: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS hingga tahun 2015						
6.1	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	-	0,2% (2009)	Menurun	▼	Estimasi KemKes 2006
6.2	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	12,80% (2002/3)	Perempuan: 10,30%	Meningkat	▼	SKRRI 2002/2003 & 2007
			Laki-laki: 18,40% (2007)		▼	
6.3	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS					
	- Menikah	-	Perempuan: 9,50% Laki-laki: 14,70% (2007)	Meningkat	▼	SDKI 2007

Indikator		Acuan Dasar	Saat Ini	Target MDGs 2015	Status	Sumber
	- Belum Menikah	-	Perempuan: 2,60% Laki-laki: 1,40% (2007)	Meningkat	▼	SKRRI 2007
Target 6B: Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010						
6.5	Proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan antiretroviral	-	38,40% (2009)	Meningkat	▼	KemKes, 2010, per 30 November 2009
Target 6C: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya hingga tahun 2015						
6.6	Angka kejadian dan tingkat kematian Malaria					
6.6a	Angka kejadian Malaria (per 1,000 penduduk):	4,68 (1990)	1,85 (2009)	Menurun	►	KemKes 2007
	Angka kejadian Malaria di Jawa & Bali (API)	0,17 (1990)	0,16 (2008)	Menurun	►	API, KemKes 2008
	Angka kejadian Malaria di luar Jawa & Bali (AMI)	24,10 (1990)	17,77 (2008)	Menurun	►	AMI, KemKes 2008
6.6b	Tingkat kematian akibat Malaria	-	1,3% (2007)	Menurun	►	Riskesdas 2007
6.7	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	-	3,3% Rural: 4,5% Urban: 1,6% (2007)	Meningkat	▼	SDKI 2007
6.8	Angka kejadian, prevalensi dan tingkat kematian akibat Tuberkulosis					
6.8a	Angka kejadian Tuberkulosis (semua kasus/100,000 penduduk/tahun)	343 (1990)	228 (2009)	Dihentikan, mulai berkurang	●	Laporan TB Global WHO, 2009
6.8b	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100,000 penduduk)	443 (1990)	244 (2009)		●	
6.8c	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100,000 penduduk)	92 (1990)	39 (2009)		●	
6.9	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dan diobati dalam program DOTS				●	* Laporan TB Global WHO, 2009
6.9a	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	20,00% (2000)*	73,10% (2009)**	70.00%	●	** Laporan Kemkes 2009
6.9b	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	87,00% (2000)*	91,00% (2009)**	85.00%	●	

Indikator		Acuan Dasar	Saat Ini	Target MDGs 2015	Status	Sumber
Tujuan 7: Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup						
Target 7A: Memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dalam kebijakan dan program nasional serta mengurangi kerusakan pada sumber daya lingkungan						
7.1	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	59,97% (1990)	52,43% (2008)	Meningkat	▼	Kemenhut
7.2	Jumlah emisi karbon dioksida (CO2)	1.416.074 Gg CO2e (2000)	1.711.626 Gg CO2e (2008)	Berkurang 26% pada 2020	▼	Kementerian Lingkungan Hidup
7.3	Jumlah konsumsi bahan perusak ozon (BPO) dalam metrik ton	8.332,7 metrik ton (1992)	0 CFCs (2009)	0 CFCs dengan mengurangi HCFCs	►	Kementerian Lingkungan Hidup
7.4	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	66,08% (1998)	91,83% (2008)	tidak melebihi batas	►	Kementerian Kelautan & Perikanan
7.5	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	26,40% (1990)	26,40% (2008)	Meningkat	►	Kementerian Kehutanan
7.6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial	0,14 persen (1990)*	4,35 persen (2009)**	Meningkat	►	* Kementerian Kahutanan, ** Kementerian Kelautan & Perikanan
Target 7C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015						
7.8	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	37,73% (1993)	47,71% (2009)	68,87%	▼	Susenas, BPS
7.8a	Perkotaan	50,58% (1993)	49,82% (2009)	75,29%	▼	
7.8b	Perdesaan	31,61% (1993)	45,72% (2009)	65,81%	▼	
7.9	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar, perkotaan dan perdesaan	24,81% (1993)	51,19% (2009)	62,41%	▼	
7.9a	Perkotaan	53,64% (1993)	69,51% (2009)	76,82%	▼	
7.9b	Perdesaan	11,10% (1993)	33,96% (2009)	55,55%	▼	

Indikator	Acuan Dasar	Saat Ini	Target MDGs 2015	Status	Sumber
Target 7D: Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh (minimal 100 juta) pada tahun 2020					
7.10	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	20,75% (1993)	12,12% (2009)	-	Susenas, BPS
Tujuan 8: Mengembangkan Kemitraan Global untuk Pembangunan					
Target 8A: Mengembangkan sistem keuangan dan perdagangan yang terbuka, berbasis peraturan, dapat diprediksi dan tidak diskriminatif					
8.6a	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	41,60% (1990)	39,50% (2009)	Meningkat	▶ BPS & Bank Dunia
8.6b	Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum	45,80% (2000)	72,80% (2009)	Meningkat	▶
8.6c	Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR	101,30% (2003)	109,00% (2009)	Meningkat	▶ Laporan Perekonomian BI 2008, 2009
Target 8D: Menangani utang negara berkembang melalui upaya nasional maupun internasional untuk dapat mengelola utang dalam jangka panjang					
8.12	Rasio pinjaman luar negeri terhadap PDB	24,59% (1996)	10,89% (2009)	Berkurang	▶ Kementerian Keuangan
8.12a	Rasio pembayaran pokok utang dan bunga utang luar negeri terhadap penerimaan hasil ekspor (DSR)	51,00% (1996)	22,00% (2009)	Berkurang	▶ Laporan Tahunan BI 2009
Target 8F: Bekerja sama dengan swasta dalam memanfaatkan teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi					
8.14	Proporsi penduduk yang memiliki jaringan PSTN (kepadatan fasilitas telepon per jumlah penduduk)	4,02% (2004)	3,65% (2009)	Meningkat	▶ Kemkominfo, 2010
8.15	Proporsi penduduk yang memiliki telepon seluler	14,79% (2004)	82,41% (2009)	100,00%	
8.16	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	-	11,51% (2009)	50,00%	▼ Susenas 2009
8.16a	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	-	8,32% (2009)	Meningkat	▼ Susenas 2009
Status: ● Sudah tercapai ▶ Akan tercapai ▼ Perlu perhatian khusus					

Lampiran 3 : Profil Pencapaian Target MDGs Provinsi

Indikator MDGs	Penduduk di bawah garis kemiskinan nasional (%)		Indeks kedalaman kemiskinan / P1 (%)	Konsumsi penduduk termiskin (%)	Rasio pekerja terhadap penduduk > 15 tahun (%)	Tingkat pengangguran usia muda (15-24 tahun) (%)	Pekerja bebas & keluarga / total penduduk yang bekerja	Persentase balita kekurangan gizi	Persentase balita gizi buruk	Persentase balita gizi kurang	Kecukupan konsumsi kalori (Kkal)	
	Susenas 2010	Susenas 2009		Susenas 2009		Sakernas 2009		Riskesdas 2007	Riskesdas 2007	Riskesdas 2007	Susenas 2009	Susenas 2009
Provinsi												
Aceh	20,98	4,46	9,66	57,05	26,10	24,75	26,5	10,7	15,8	12,44	52,43	12,44
Sumatera Utara	11,31	1,92	9,17	63,30	20,34	29,40	22,7	8,4	14,3	14,48	63,03	14,48
Sumatera Barat	9,50	1,41	9,70	59,08	21,84	30,43	20,2	5,9	14,3	9,91	49,36	9,91
Riau	8,65	1,25	8,77	56,77	22,00	21,91	21,4	7,5	13,9	14,15	63,13	14,15
Jambi	8,34	1,38	10,10	62,96	18,02	26,24	18,9	6,3	12,6	15,34	62,79	15,34
Sumatera Selatan	15,47	3,06	9,26	63,11	19,91	31,53	18,2	6,5	11,7	14,75	56,77	14,75
Bengkulu	18,30	2,98	9,57	66,61	15,96	35,02	16,7	4,8	11,9	9,74	58,03	9,74
Lampung	18,94	3,94	8,72	63,29	17,48	36,43	17,5	5,7	11,8	14,86	59,56	14,86
Bangka Belitung	6,51	1,20	9,89	61,06	15,86	20,22	18,3	4,6	13,7	16,50	71,49	16,50
Kepulauan Riau	8,05	2,02	9,40	59,34	14,75	9,14	12,4	3,0	9,4	9,75	50,75	9,75
DKI Jakarta	3,48	0,57	8,08	58,51	24,97	6,80	12,9	2,9	10,0	14,63	64,44	14,63
Jawa Barat	11,27	1,95	8,19	56,00	32,21	24,94	15,0	3,7	11,3	12,68	59,54	12,68
Jawa Tengah	16,56	2,96	9,29	64,19	23,49	32,16	16,0	4,0	12,0	15,22	66,89	15,22
DI Yogyakarta	16,83	3,52	7,69	66,01	25,07	26,46	10,9	2,4	8,5	20,68	71,73	20,68
Jawa Timur	15,26	2,88	8,93	65,73	17,95	32,31	17,4	4,8	12,6	15,35	67,77	15,35
Banten	7,16	1,32	8,26	54,19	34,14	16,65	16,6	4,4	12,2	9,71	57,31	9,71
Bali	4,88	0,74	9,27	75,39	9,96	27,98	11,4	3,2	8,2	3,88	40,46	3,88
Nusa Tenggara Barat	21,55	5,15	8,27	64,36	13,21	38,02	24,8	8,1	16,7	13,29	58,95	13,29
Nusa Tenggara Timur	23,03	4,14	9,13	69,22	9,13	37,49	33,6	9,4	24,2	21,35	58,61	21,35
Kalimantan Barat	9,02	1,55	8,74	69,45	15,49	31,84	22,5	8,5	14,0	16,69	61,09	16,69
Kalimantan Tengah	6,77	1,03	9,71	67,92	13,34	28,21	24,2	8,1	16,1	11,10	50,76	11,10
Kalimantan Selatan	5,21	0,73	8,68	67,06	20,23	27,54	26,6	8,4	18,2	11,28	53,66	11,28
Kalimantan Timur	7,66	1,51	8,37	57,44	26,33	17,17	19,3	6,2	13,1	30,09	74,62	30,09
Sulawesi Utara	9,10	1,55	9,51	55,50	32,82	20,89	15,8	4,3	11,5	14,57	63,61	14,57
Sulawesi Tengah	18,07	4,09	8,42	65,51	13,53	31,19	27,6	8,9	18,7	18,05	60,30	18,05
Sulawesi Selatan	11,60	2,08	8,31	56,92	17,14	29,23	17,6	5,1	12,5	12,71	55,28	12,71
Sulawesi Tenggara	17,05	3,44	8,97	67,05	10,80	32,56	22,7	6,8	15,9	16,55	60,34	16,55
Gorontalo	23,19	4,59	9,07	60,01	16,66	27,96	25,4	8,2	17,2	18,75	71,02	18,75
Sulawesi Barat	13,58	2,47	9,58	65,00	12,11	29,30	25,4	10,0	15,4	11,90	69,21	11,90
Maluku	27,74	5,59	9,84	58,52	20,73	30,94	27,8	9,3	18,5	18,22	60,04	18,22
Maluku Utara	9,42	1,44	9,66	59,85	18,74	27,63	22,8	6,7	16,1	32,01	72,04	32,01
Papua Barat	34,88	9,75	9,47	63,34	19,36	26,20	23,2	6,8	16,4	37,16	68,99	37,16
Papua	36,80	9,07	8,63	74,58	10,02	37,75	21,2	6,6	14,6	22,64	60,87	22,64
INDONESIA	13,33	2,50	8,75	61,93	22,20	28,36	18,4	5,4	13,0	14,47	61,86	14,47

Indikator MDGs	Angka melek huruf usia 15-24 tahun	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun	Rasio APM perempuaan /laki-laki di SD, MI & Paket A	Rasio APM perempuaan /laki-laki di SMP, MTs & Paket B	Rasio APM perempuaan /laki-laki di SMA	Rasio APM perempuaan /laki-laki di perguruan tinggi	Rasio melek huruf perempuaan / laki-laki usia 15-24 tahun	Kontribusi perempuaan dalam pekerjaan (non-upahan (non-pertanian) – (%))	Angka kematian balita / AKBA (5q0)	Angka kematian bayi / AKB (1q0)	Angka kematian neonatal (NN)	Anak usia 1 tahun yang dimunisasi campak - total
Provinsi	Susenas 2009	Susenas 2009	Susenas 2009	Susenas 2009	Susenas 2009	Susenas 2009	Susenas 2009	Susenas 2009	Sakernas 2009	SDKI 2007	SDKI 2007	SDKI 2007	SDKI 2007
Aceh	99,90	99,89	99,92	100,01	99,63	103,19	138,95	100,03	34,20	45	25	14	40,9
Sumatera Utara	99,86	99,93	99,79	100,23	101,90	100,82	106,78	99,86	33,30	67	46	24	36,6
Sumatera Barat	99,81	99,81	100,38	100,73	103,68	116,92	134,68	100,00	36,73	62	47	34	67,4
Riau	99,95	99,94	99,95	101,01	96,41	111,02	117,16	100,02	27,86	47	37	28	61,9
Jambi	99,98	99,96	100,00	100,64	105,58	109,99	97,21	100,04	33,68	47	39	23	58,0
Sumatera Selatan	99,92	99,91	99,94	99,77	108,84	111,64	118,86	100,03	37,89	52	42	25	58,8
Bengkulu	99,87	99,92	99,82	100,43	105,92	104,86	125,76	99,90	30,26	65	46	17	79,2
Lampung	99,93	99,93	99,93	98,45	96,82	94,49	162,80	100,00	27,20	55	43	27	59,2
Bangka Belitung	99,68	99,73	99,64	100,54	108,81	112,19	106,07	99,91	24,84	46	39	20	64,6
Kepulauan Riau	99,91	99,93	99,89	102,50	99,00	143,22	88,70	99,96	38,50	58	43	18	76,8
DKI Jakarta	99,99	99,98	100,00	99,49	95,67	78,85	81,09	100,02	40,23	36	28	15	69,8
Jawa Barat	99,90	99,92	99,87	99,64	101,99	86,72	84,33	99,95	30,64	49	39	19	74,2
Jawa Tengah	99,82	99,85	99,79	99,32	105,54	98,07	124,88	99,94	35,73	32	26	14	72,3
DI Yogyakarta	100,00	100,00	100,00	102,19	114,32	94,69	76,35	100,00	34,62	22	19	15	94,8
Jawa Timur	99,44	99,51	99,36	99,61	99,83	87,98	93,29	99,86	33,75	45	35	21	74,0
Banten	99,94	99,96	99,92	100,07	98,67	92,00	95,17	99,96	32,40	58	46	25	74,6
Bali	99,14	99,09	99,19	97,79	94,58	91,86	88,94	100,10	36,08	38	34	14	85,5
Nusa Tenggara Barat	99,01	99,57	98,54	99,63	102,96	83,64	113,44	98,96	33,21	92	72	34	77,1
Nusa Tenggara Timur	97,79	97,95	97,64	100,71	111,78	118,21	101,29	99,68	29,05	80	57	31	60,5
Kalimantan Barat	99,15	99,10	99,19	99,36	101,44	101,05	90,79	100,09	30,37	59	46	23	64,9
Kalimantan Tengah	99,86	99,91	99,82	98,72	104,84	98,72	105,91	99,92	28,11	34	30	13	77,6
Kalimantan Selatan	99,85	99,91	99,79	99,39	103,99	100,98	157,79	99,88	31,18	75	58	39	57,8
Kalimantan Timur	99,86	99,92	99,80	99,84	104,23	109,41	118,32	99,88	28,74	38	26	16	78,3
Sulawesi Utara	99,86	99,74	99,99	100,01	104,75	109,80	126,15	100,25	30,47	43	35	24	80,9
Sulawesi Tengah	99,90	99,80	100,00	99,36	108,29	104,64	109,53	100,20	35,55	69	60	28	51,5
Sulawesi Selatan	98,31	98,20	98,41	99,76	99,10	97,45	142,62	100,21	34,03	53	41	22	66,6
Sulawesi Tenggara	99,39	99,33	99,46	99,39	103,79	101,44	125,20	100,13	33,07	62	41	16	71,8
Gorontalo	99,03	98,71	99,34	100,18	116,17	108,45	107,85	100,64	37,27	69	52	22	65,9
Sulawesi Barat	97,65	97,24	98,05	100,35	105,18	124,06	136,41	100,84	33,74	96	74	46	58,0
Maluku	99,85	99,85	99,85	101,81	104,17	107,34	109,40	100,00	33,20	93	59	25	50,2
Maluku Utara	99,78	99,76	99,81	98,65	93,60	94,65	117,90	100,05	32,33	74	51	32	50,8
Papua Barat	97,01	97,95	96,06	96,39	97,69	68,60	103,34	98,07	27,05	62	36	21	51,0
Papua	79,69	84,28	74,93	98,33	89,54	88,83	87,68	88,90	26,81	64	41	24	49,0
INDONESIA	99,47	99,55	99,40	99,73	101,99	96,16	102,95	99,85	33,45	44	34	19	67,0

Indikator MDGs	Proporsi kelahiran yang ditolong oleh nakes	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate)	Angka Kesuburan Menurut Kelompok Umur 15-19 (ASFR)	Penggunaan kontrasepsi perempuan menikah (15-49) - semua metode	Penggunaan kontrasepsi perempuan menikah (15-49 tahun) - metode modern	Penggunaan kontrasepsi perempuan menikah (15-49 tahun) - metode tradisional	Cakupan antenatal care (K1)	Cakupan antenatal care (K4)	Unmet need KB	Unmet need KB – penjarangan	Unmet need KB – pembatasan
Provinsi	Susenas 2009	SDKI 2007 (adjusted)	SDKI 2007	SDKI 2007	SDKI 2007	SDKI 2007	SDKI 2007	SDKI 2007	SDKI 2007	SDKI 2007	SDKI 2007
Aceh	85,86	2,8	33,0	47,4	45,4	2,0	89,2	70,0	12,0	8,9	3,0
Sumatera Utara	88,68	3,5	19,0	54,2	42,6	11,5	89,3	66,3	12,3	5,1	7,2
Sumatera Barat	88,86	3,0	14,0	59,9	52,8	7,2	96,0	86,1	11,2	6,3	5,0
Riau	82,71	2,6	25,0	56,7	52,8	4,0	93,2	77,9	9,1	5,5	3,6
Jambi	70,51	2,4	30,0	65,2	62,5	2,7	84,6	75,7	7,0	3,5	3,6
Sumatera Selatan	78,72	2,3	25,0	64,8	62,6	2,1	91,3	74,0	7,4	3,4	4,0
Bengkulu	85,20	2,3	44,0	74,0	70,4	3,6	93,7	79,4	6,1	2,7	3,4
Lampung	76,37	2,4	39,0	71,1	66,0	5,0	95,4	86,2	5,5	2,4	3,1
Bangka Belitung	85,37	2,4	57,0	67,8	64,7	3,1	94,0	86,2	3,2	1,9	1,3
Kepulauan Riau	87,45	2,6	25,0	57,6	54,0	3,5	99,5	85,1	12,3	5,3	7,1
DKI Jakarta	98,14	1,8	11,0	60,1	56,4	3,7	99,5	97,7	6,9	3,2	3,7
Jawa Barat	70,17	2,3	36,0	61,1	60,3	0,8	95,3	84,4	10,0	4,6	5,4
Jawa Tengah	84,30	2,0	27,0	63,7	60,0	3,8	97,3	90,4	7,4	2,7	4,7
DI Yogyakarta	96,94	1,5	7,0	66,9	54,8	12,0	99,3	97,0	6,8	2,9	3,9
Jawa Timur	86,33	1,9	54,0	66,1	62,3	3,8	93,2	86,4	8,2	3,2	5,1
Banten	68,86	2,5	23,0	57,4	55,4	2,0	86,3	72,6	9,0	5,6	3,4
Bali	96,22	2,1	43,0	69,4	65,4	4,0	98,8	94,4	5,8	2,2	3,6
Nusa Tenggara Barat	71,32	2,7	60,0	54,8	52,2	2,7	95,3	86,0	12,9	8,6	4,3
Nusa Tenggara Timur	49,85	3,7	31,0	42,1	30,1	12,0	87,1	74,4	17,4	9,8	7,7
Kalimantan Barat	59,06	2,3	41,0	62,7	61,2	1,5	90,6	72,9	7,7	4,7	3,0
Kalimantan Tengah	63,55	2,5	34,0	66,5	65,2	1,3	91,0	82,9	5,7	3,7	2,1
Kalimantan Selatan	76,01	2,5	54,0	76,01	63,2	1,2	93,0	76,1	6,2	3,3	2,9
Kalimantan Timur	85,24	2,0	34,0	59,2	55,4	3,9	93,9	81,6	7,7	3,4	4,3
Sulawesi Utara	82,81	2,3	34,0	69,3	66,7	2,6	95,9	79,1	6,1	2,2	3,9
Sulawesi Tengah	62,47	3,3	92,0	63,6	59,8	3,8	90,7	75,0	8,3	4,0	4,3
Sulawesi Selatan	69,48	2,3	34,0	53,4	42,9	10,5	92,2	64,4	13,9	9,2	4,6
Sulawesi Tenggara	48,72	3,0	48,0	50,7	44,4	6,2	91,3	71,3	12,9	8,5	4,4
Gorontalo	63,17	2,3	61,0	60,1	58,8	1,4	88,5	66,3	6,6	4,9	1,8
Sulawesi Barat	47,45	3,1	47,0	45,4	44,5	0,9	86,6	61,3	17,4	12,3	5,0
Maluku	42,48	3,7	31,0	34,1	29,4	4,8	70,3	50,7	22,4	8,9	13,5
Maluku Utara	47,21	2,9	82,0	48,8	46,2	2,5	88,0	80,0	13,0	6,7	6,3
Papua Barat	60,43	2,9	51,0	39,6	37,5	13,8	80,4	50,0	16,6	12,2	4,3
Papua	49,08	3,2	40,0	38,3	24,5	2,1	69,0	52,7	15,8	7,7	8,1
INDONESIA	77,34	2,3	35,0	61,4	57,4	4,0	93,3	81,5	9,1	4,3	4,7

Indikator MDGs	Angka kumulatif kasus HIV/AIDS per 100,000 penduduk	Angka kumulatif kasus HIV/AIDS	Prevalensi kasus AIDS per 100,000 penduduk	Angka kejadian malaria menurut diagnosis klinis	Angka kejadian malaria menurut konfirmasi laboratorium	Balita diare dalam 2 minggu terakhir	Angka Penemuan Kasus Baru TB Paru BTA positif (CDR)	Angka kesembuhan - Cured Rate	Angka keberhasilan pengobatan - Success Rate	Angka kasus DBD	Tingkat kejadian DBD
Provinsi	KemKes 2010	KemKes 2010	KemKes 2010	KemKes 2008	KemKes 2008	SDKI 2007	KemKes 2009	KemKes 2009	KemKes 2009	KemKes 2008	KemKes 2008
Aceh	0,11	44	1,07	8.637	1.053	19,1	43,9	84,7	93,1	2.436	54,76
Sumatera Utara	0,37	485	3,71	73.275	2.274	15,8	65,6	93,5	96,1	4.454	34,49
Sumatera Barat	0,73	382	8,50	6.325	1.015	14,5	48,3	77,9	88,1	1.907	42,67
Riau	0,84	476	8,51	12.644	957	16,7	33,9	72,6	83,9	828	15,96
Jambi	0,58	165	5,77	51.401	6.028	15,3	60,5	83,5	92,3	245	8,64
Sumatera Selatan	0,30	219	3,04	29.212	2.389	14,7	44,8	92,6	94,0	2.360	34,75
Bengkulu	0,52	91	5,20	31.064	6.355	20,5	59,5	97,4	97,4	339	19,39
Lampung	0,19	144	1,86	17.566	2.108	10,6	41,2	85,9	92,8	4.807	68,83
Bangka Belitung	1,14	117	11,36	42.288	8.426	6,4	52,2	84,9	87,2	34	3,07
Kepulauan Riau	2,22	334	22,29	16.572	1.666	14,3	32,3	67,4	88,5	1.724	133,07
DKI Jakarta	3,17	2.828	31,67	-	-	6,9	81,0	69,5	85,6	28.361	317,09
Jawa Barat	0,86	3.599	8,60	42.924	636	18,2	70,8	85,1	92,0	23.248	54,23
Jawa Tengah	0,22	752	2,33	120.042	947	9,3	48,1	83,8	90,1	19.235	58,45
DI Yogyakarta	0,85	290	8,51	3.040	67	5,4	51,5	78,4	82,5	2.119	61,72
Jawa Timur	0,89	3.540	9,80	38.920	2.651	13,3	56,6	82,8	89,2	16.589	44,68
Banten	0,31	318	3,06	2.692	103	10,1	77,7	85,5	92,2	3.954	46,16
Bali	4,55	1.725	48,55	18.522	242	9,1	66,7	66,9	85,4	6.254	181,31
Nusa Tenggara Barat	0,26	133	2,87	96.621	21.564	18,5	33,2	78,7	91,8	777	18,10
Nusa Tenggara Timur	0,32	139	3,19	425.134	83.110	15,2	34,7	80,6	90,7	279	7,07
Kalimantan Barat	1,69	794	16,91	10.859	2.168	15,2	45,8	88,8	93,0	947	22,29
Kalimantan Tengah	0,09	30	1,26	19.784	4.470	20,8	30,6	80,1	92,8	531	27,11
Kalimantan Selatan	0,08	27	0,78	10.581	2.630	15,7	39,4	89,8	93,9	576	15,69
Kalimantan Timur	0,04	11	0,35	14.654	3.487	13,7	31,1	67,7	85,6	5.762	220,03
Sulawesi Utara	0,77	173	7,69	27.063	5.530	14,1	85,2	87,1	96,8	1.430	63,58
Sulawesi Tengah	0,05	12	0,46	45.164	6.486	15,8	36,8	80,7	94,3	1.389	55,25
Sulawesi Selatan	0,67	591	6,65	9.386	1.933	11,7	38,7	86,4	89,9	3.545	46,46
Sulawesi Tenggara	0,09	21	0,91	22.612	609	14,2	51,6	80,6	95,5	1.006	46,21
Gorontalo	0,03	3	0,33	10.674	3.160	16,7	66,3	80,4	97,1	172	18,74
Sulawesi Barat	-	-	-	8.213	391	22,2	42,8	74,5	86,9	37	3,65
Maluku	1,42	192	14,21	54.907	12.376	9,7	71,6	89,2	97,3	-	-
Maluku Utara	0,10	13	1,36	49.683	8.606	14,1	34,6	52,2	83,3	250	25,25
Papua Barat	0,89	58	8,93	117.466	32.337	13,0	40,8	38,5	70,5	510	13,47
Papua	13,31	2.858	135,44	187.005	40.503	15,3	56,8	49,5	77,0	228	90,41
INDONESIA	0,87	20.564	8,92	1.624.930	266.277	13,7	73,1	82,9	91,0	136.333	60,06

Indikator MDGs	Akses terhadap sumber air minum tidak layak (perdesaan)	Akses terhadap sanitasi layak	Akses terhadap sanitasi layak (perkotaan)	Akses terhadap sanitasi layak (perdesaan)	Persentase Rumah Tangga Kumuh Perkotaan	Rumah tangga yang memiliki komputer	Persentase rumah tangga yang memiliki akses internet
Provinsi	Susenas 2009	Susenas 2009	Susenas 2009	Susenas 2009	Susenas 2009	Susenas 2009	Susenas 2009
Aceh	60,58	42,03	73,03	29,96	9,79	6,13	7,68
Sumatera Utara	56,05	51,92	72,88	34,09	7,88	7,16	8,28
Sumatera Barat	56,05	39,21	65,73	25,19	8,54	8,43	13,87
Riau	46,13	52,75	75,60	29,96	10,45	10,44	12,31
Jambi	50,37	40,93	63,53	30,48	7,65	6,35	7,08
Sumatera Selatan	53,89	41,48	73,10	22,71	13,96	7,47	9,18
Bengkulu	70,25	34,66	59,16	21,55	13,34	10,47	10,45
Lampung	55,98	38,43	57,60	31,71	10,92	4,28	5,47
Bangka Belitung	47,87	60,66	77,04	45,51	8,51	9,13	10,17
Kepulauan Riau	59,21	45,78	75,43	12,24	14,12	10,88	12,56
DKI Jakarta	-	80,37	80,37	-	25,14	20,34	34,32
Jawa Barat	54,21	52,17	62,12	38,47	14,58	9,27	12,29
Jawa Tengah	42,66	54,06	67,20	41,76	5,59	6,18	9,64
DI Yogyakarta	33,13	75,35	84,99	56,26	5,10	18,99	27,92
Jawa Timur	38,93	51,07	69,51	33,63	8,60	7,61	11,35
Banten	63,07	58,82	77,03	30,10	15,65	12,00	12,53
Bali	24,03	75,95	85,72	62,60	13,25	11,58	12,38
Nusa Tenggara Barat	54,48	39,83	49,51	32,86	23,96	4,01	6,82
Nusa Tenggara Timur	60,41	14,98	35,43	10,80	28,85	4,63	4,64
Kalimantan Barat	52,62	40,12	81,23	24,77	5,74	4,98	6,93
Kalimantan Tengah	69,74	28,78	56,13	10,11	13,26	6,31	6,05
Kalimantan Selatan	63,41	41,16	64,31	25,05	9,00	6,51	10,26
Kalimantan Timur	47,67	58,48	75,69	30,69	9,74	14,24	18,57
Sulawesi Utara	47,70	63,59	78,84	51,89	17,01	7,97	11,62
Sulawesi Tengah	56,04	42,02	70,41	34,49	14,05	4,69	5,82
Sulawesi Selatan	53,72	57,58	85,38	44,18	8,58	5,27	9,80
Sulawesi Tenggara	43,65	45,91	78,87	35,98	10,69	5,40	6,55
Gorontalo	60,86	43,84	73,17	30,31	12,46	7,94	9,91
Sulawesi Barat	64,91	45,35	66,59	35,13	19,08	4,80	4,13
Maluku	51,14	38,69	70,50	27,27	18,81	5,24	7,82
Maluku Utara	64,93	43,18	85,50	25,39	7,55	5,68	6,29
Papua Barat	45,84	32,63	56,05	21,38	21,38	5,79	8,24
Papua	65,76	21,65	54,03	12,45	25,36	7,89	6,40
INDONESIA	50,34	51,19	69,51	33,96	12,12	8,32	11,51

Lampiran 4 :

Dokumen Kebijakan Lain yang Terkait dalam Penyusunan RAD MDGs

NO	TUJUAN MDGs	DOKUMEN YANG DIRUJUK
1	Tujuan 1 : Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan	• PP No. 15 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja • Perpres No. 15 tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan • Permendagri No. 42 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota • Rencana Aksi Pangan dan Gizi 2011-2015 • Perencanaan Tenaga Kerja Nasional (PTKN) • Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)
2	Tujuan 2 : Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua	• UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen • Permendiknas No. 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten/ Kota
3	Tujuan 3 : Mendorong Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	• UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik • Perpres No. 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan • Inpres No. 9 tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional • Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah • PMK No. 119/PMK.02/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran K/L dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2010 • PMK No. 104/PMK.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga Tahun Anggaran 2011
4	Tujuan 4 : Mengurangi Angka Kematian Anak	• Pedoman Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)
5	Tujuan 5 : Meningkatkan Kesehatan Ibu	• UU No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga • Rancang Bangun Penurunan AKI • Strategi <i>Making Pregnancy Safer</i> (MPS)
6	Tujuan 6 : Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya (TB)	• Strategi dan Rencana Aksi Penanggulangan HIV dan AIDS 2010-2014 • Strategi STOP TB • Strategi Gebrak Malaria

NO	TUJUAN MDGs	DOKUMEN YANG DIRUJUK
7	Tujuan 7 : Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup	• UU No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya • UU No. 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman • UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 tentang penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menjadi UU • UU No. 7 Tahun 2004 Tentang sumber daya air • UU No. 31 Tahun 2004 dan UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan • UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengolahan Sampah • UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup • PP No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa • PP No. 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar • PP No. 5 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan • PP No. 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan air minum • PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota • <i>Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR)</i> • Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim (RAN PI) • <i>Indonesia Biodiversity Strategic Action Plan (IBSAP)</i> • Kebijakan nasional air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL) berbasis masyarakat tahun 2003

Lampiran 5 : Matrik RAD MDGs
Matriks Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target MDGs

TUJUAN 1 : Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan													
Program/Kegiatan	Indikator	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2010	2011	2012	2013	2014/2015	2010	2011	2012	2013	2014		
TARGET 1A: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari US\$ 1 (PPP) per hari dalam kurun waktu 1990 - 2015													
NASIONAL													
Program Kependudukan dan Keluarga Berencana													
Peningkatan kemandirian ber-KB keluarga Pra-S dan KS-1	1.PD Jumlah mitra kerja yang memberikan bantuan modal dan pembinaan kewirausahaan kepada kelompok usaha ekonomi produktif	34 (1 Pusat dan 33 Provinsi)	34 (1 Pusat dan 33 Provinsi)	34 (1 Pusat dan 33 Provinsi)	34 (1 Pusat dan 33 Provinsi)	34 (1 Pusat dan 33 Provinsi)	22.5	25.3	27.2	29.3	31.5	APBN	BKBN dan BKKBN Provinsi
	1a TOT bagi pengelola pemberdayaan ekonomi keluarga	-	66	33	-	-							
	2.PD Jumlah mitra kerja yang menjadi pendamping kelompok usaha ekonomi produktif	3	3	3	3	3							
	2a Pelatihan untuk pendampingan kelompok UPPKS												
DAERAH													
Kegiatan 1	-												
Kegiatan 2	-												
dst													

Keterangan:
Kegiatan pada tingkat daerah (Provinsi) dikluster dalam kegiatan Pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan KB Provinsi.
P= Pusat; D=Daerah/Provinsi; P-D= Pusat-Daerah

TUJUAN 1 : Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan

Program/Kegiatan/ Tindakan	Indikator	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
TARGET 1B : Menciptakan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda													
Indikator MDGs :													
1. Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja													
2. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas													
3. Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja keluarga terhadap total kesempatan kerja													
Nasional													
Kerangka Kebijakan Nasional	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,0-6,3	6,4-6,9	6,7-7,4	7,0-7,7								
	Pertumbuhan Investasi (%)	7,9-10,9	8,4-11,5	10,2-12,0	11,7-12,1								
	Pertumbuhan PDB Sisi Produksi (%)												
	- Pertanian	3,4-3,5	3,5-3,7	3,6-3,8	3,7-3,9								
	- Industri Pengolahan	5,9-5,4	5,7-6,5	6,2-6,8	6,5-7,3								
	-Lainnya	7,0-7,3	7,3-7,7	7,5-8,4	7,8-8,6								
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	7,3-7,4	6,7-7,0	6,0-6,6	5,0-6,0								
Daerah													
Kerangka Kebijakan Daerah	Pertumbuhan Ekonomi (%)												
	Pertumbuhan Investasi (%)												
	Pertumbuhan PDB Sisi Produksi (%)												
	- Pertanian												
	- Industri Pengolahan												
	-Lainnya												
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)												

Kolom Program/Kegiatan diisi oleh daerah dengan mempertimbangan :

- 1. Program/kegiatan yang erat kaitannya dengan upaya mendorong peningkatan investasi di daerah, baik dalam kerangka kebijakan maupun anggaran
 - 2. Program/kegiatan yang dapat memfungsikan peran seluruh lembaga pelatihan di daerah, misalnya lembaga-lembaga pelatihan di tingkat daerah termasuk pelatihan keterampilan calon pekerja di daerah
 - 3. Program/kegiatan yang memberikan peluang pekerjaan dan menciptakan kesempatan kerja seperti padat karya produktif, pembangunan infrastruktur sederhana, pengembangan UMKM, dan lain-lain, yang dilakukan di daerah
- Program/kegiatan kemudian diisi kedalam indikator, target, alokasi, sumber pendanaan dan pelaksana di daerah

TUJUAN 1 : Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan

Program/Kegiatan/ Tindakan	Indikator	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
TARGET 1C : Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015													
Indikator MDGs :		1. Prevalensi balita kekurangan gizi											
		2. Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum											
Nasional													
Program 1 : Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak													
Kegiatan 1 : Pembinaan Gizi Masyarakat	1. Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100	100	100	100	-	-	536.0	643.0	668.0	-	APBN	Kementerian Kesehatan
	2. Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)	70	75	80	85	-	-						
Daerah													
Kegiatan 1													
Kegiatan 2													
dst													

Target 2A: Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar

Program/ Kegiatan	Indikator	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015			
Indikator MDGs:	1. Angka Partisipasi Murni (APM) sekolah dasar pada tahun 2015 sebesar 100 persen													
	2. Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar pada tahun 2015 sebesar 100 persen													
	3. Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki pada tahun 2015 sebesar 100 persen													
NASIONAL														
Program Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar														
Kegiatan 1: Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD	APM SD/SDLB	84.74%	85.10%	85.19%	85.36%	-	1.619.1	2,394.5	2,929.2	3,537.1	-	APBN	Kementerian Pendidikan Nasional	
Kegiatan 2: Penyediaan subsidi Pendidikan SD/SDLB berkualitas	Jumlah siswa SD/SDLB sasaran BOS	#####	#####	#####	#####	-	#####	#####	#####	#####	-	APBN	Kementerian Pendidikan Nasional	
DAERAH														
Kegiatan 1														
Kegiatan 2														
Program Pendidikan Islam														
Kegiatan 1: Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Ibtidaiyah	APM MI	10.56%	10.60%	10.61%	10.64%	-	2,322.7	2,792.7	3,146.2	3,760.7	-	APBN	Kementerian Agama	
Kegiatan 2: Penyediaan Subsidi Pendidikan Madrasah Bermutu	Siswa MI penerima BOS	3,431,289	3,482,758	3,535,000	3,588,025	-	3,624.0	3,669.0	3,715.0	3,762.0	-	APBN	Kementerian Agama	
Kegiatan 3: Penyediaan Subsidi Pendidikan Agama Islam Bermutu	Siswa Diniyah Ula Penerima BOS	195,630	198,564	201,543	204,566	-	321.2	326.0	330.9	335.8	-	APBN	Kementerian Agama	

DAERAH												
Kegiatan 1												
Kegiatan 2												
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Sekretariat Jenderal Kemendiknas												
Kegiatan 1: Penyediaan Buku Ajar yang SD yang dibeli hak ciptanya - Total 78 Mata Pelajaran		100%	-	-	-	117.7	122.1	126.1	130.3	-	APBN	Kementerian Pendidikan Nasional
Kegiatan 2: Peningkatan Kapasitas Manajemen Bagi Pendidikan Dasar		meningkat	meningkat	meningkat	meningkat	253.1	264.5	275.0	286.0	-	APBN	Kementerian Pendidikan Nasional
DAERAH												
Kegiatan 1												
Kegiatan 2												
Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional												
Kegiatan 1: Penyediaan Sistem dan Kurikulum Belajar-Mengajar		15,0%	25,0%	65,0%	100,0%	63,1	67,1	71,0	77,3	-	APBN	Kementerian Pendidikan Nasional
DAERAH												
Kegiatan 1												
Kegiatan 2												
Program Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan												
Kegiatan 1: Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Jenjang Sekolah Dasar		25%	45%	70%	90%	79,3	86,6	94,8	103,5	-	APBN	Kementerian Pendidikan Nasional
DAERAH												
Kegiatan 1												
Kegiatan 2												

Tujuan 3: Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET						ALOKASI ANGGARAN					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014		
Tujuan 3: Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan														
Indikator MDGs:	3.1.	Rasio perempuan terhadap laki-laki di tingkat pendidikan dasar, menengah atas dan perguruan tinggi												
	-	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD												
	-	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP												
	-	Rasio APM perempuan/ laki-laki di SMA												
	-	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi												
	3.1a	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun												
	3.2	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian												
	3.3	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR												
Program Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar														
Nasional dan Daerah														
Kegiatan 1: Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD	Rasio APM peserta didik perempuan: laki-laki pada SD/SDLB	>0,98	>0,98	>0,98	1	1	1	1153.5	1619.1	2394.5	2929.2	3537.1	APBN	Kemdiknas
Kegiatan 2: Penjaminan Kepastian Pendidikan SMP	Rasio APM peserta didik perempuan:laki-laki pada SMP/SMPLB	>0,97	>0,97	>0,98	1	1	1	1687.6	2185.4	2515.4	2936.2	3360.0	APBN	Kemdiknas
Program Pendidikan Menengah														
Kegiatan 1: Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMA	Rasio APK peserta didik perempuan:laki-laki pada SMA/SMK/SLMB	>0,80	>0,85	>0,85	>0,90	1	1	988.9	1290.0	1353.7	1409.5	1488.5	APBN	Kemdiknas
Program Pendidikan Tinggi														
Kegiatan 1: Penyediaan Layanan Akademik program Studi	Rasio APK peserta didik perempuan/laki-laki di PT	1.12	1.08	1.05	1.05	1.04	1.04	2885.8	2991.3	3195.6	3396.6	3609.8	APBN	Kemdiknas

Program Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
Kegiatan 1: Penyediaan Guru untuk Seluruh Jenjang Pendidikan	Rasio guru perempuan:laki-laki yang bersertifikat pendidik	60.00%	68.00%	75.00%	85.00%	95.00%	95.00%	5134.2	7624.4	11634.4	16485.5	24222.9	APBN	kemdiknas
Program Pendidikan Nonformal dan Informal														
Kegiatan 1: Penyediaan Layanan Pendidikan Masyarakat	Rasio kesetaraan gender penuntasan buta aksara	97,6	97,8	98,0	98,0	98,0	98,0						APBN	Kemdiknas
Program Pendidikan Islam														
Nasional dan Daerah														
Kegiatan 1: Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Ibtidaiyah	Rasio APM peserta didik perempuan:laki laki pada MI	>0,98	>0,98	>0,98	1	1	1	1,464.6	2,103.3	2,578.7	2,938.5	3,566.6	APBN	Kemenag
Kegiatan 2: Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Tsanawiyah	Rasio APM peserta didik perempuan:laki laki pada MTs	>0,97	>0,97	>0,98	1	1	1						APBN	Kemenag
Kegiatan 3: Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Aliyah	Rasio APM peserta didik perempuan:laki laki pada MA	>0,8	>0,85	>0,9	>0,9	1	1	1,089.1	1,112.6	1,246.2	1,345.8	1,547.7	APBN	Kemenag
Kegiatan 4: Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi Islam	Rasio APM peserta didik perempuan:laki laki pada PTA	1.12	1.12	1.12	1.12	1.04	1.04	1,572.6	1,689.6	1,943.0	2,234.4	2,569.6	APBN	Kemenag
Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Pendidikan Islam														
Nasional dan Daerah														
Kegiatan 1: Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Rasio guru perempuan : laki-laki yang bersertifikat pendidik di madrasah	50%	60%	70%	80%	85%	85%	6,004.8	7,565.0	9,085.5	11,087.9	#####	APBN	Kemenag

Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan																
Nasional dan Daerah																
Kegiatan 1: Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang pendidikan yang responsif gender	1.	Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan	2	1	-	-	-	-	3	2.1	2.0	2.1	2.4	2.6	APBN	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.	Jumlah K/L dan pmda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang pendidikan														
		K/L	1	1	1	1	1	1	5							
		prov	5	2	2	5	5	5	19							
	3.	Jumlah K/L dan pmda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang pendidikan														
		K/L	-	1	1	1	1	1	1							
		prov	-	2	2	2	2	2	8							
	4.	Jumlah pedoman moniev pelaksanaan PUG di bidang pendidikan dasar, menengah, tinggi, serta pendidikan budi pekerti dan karakter bangsa	1	-	-	-	-	-	1							

Kegiatan 3: Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang ketenagakerjaan yang responsif gender	1.	Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang ketenagakerjaan	1	1	1	-	-	3	2.0	2.0	2.3	4.0	4.3	APBN	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.	Jumlah K/L dan pmda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang ketenagakerjaan	1	1	1	1	1	1							
		K/L	1	1	1	1	1	1							
		prov	5	5	5	5	5	25							
	3.	Jumlah K/L dan pmda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang ketenagakerjaan													
		K/L	-	-	-	-	1	1							
Kegiatan 4: Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan		prov	2	2	2			9							
	1.	Jumlah kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	1	-	-	-	-	3	2.8	2.8	2.7	2.3	2.4	APBN	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.	Jumlah K/L dan pmda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan													
		K/L	1	1	1	1	1	1							
		prov	5	5	5	5	5	3							
	3.	Jumlah kompilasi data perlindungan tenaga kerja perempuan													
Program Daerah		K/L	1	1	-	-	1	1							
		prov	2	2	-	-	2	1							
Program															
Daerah															

TUJUAN 4 : Menurunkan Angka Kematian Anak

[illegible]

TUJUAN 5 : Meningkatkan Kesehatan Ibu

Program/Kegiatan/ Tindakan	Indikator	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
TARGET 5A : Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990-2015													
Indikator MDGs :		1. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup											
		2. Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih											
Nasional													
Program 1 : Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak													
Kegiatan 1 : Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi	1. Persentase Ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan PN)	86	88	89	90	-	490.0	520.0	537.0	547.0	-	APBN	Kementerian Kesehatan
	2. Persentase Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan ke empat (K4))	88	90	93	95	-							
	3. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai standar	40	75	90	100	-							
	4. Presentase Puskesmas rawat inap yang mampu melaksanakan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi dasar (PONED)	70											
	5. Presentase RS kabupaten/ kota yang melaksanakan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)	85											
Daerah													
Kegiatan 1													
Kegiatan 2													
dst													

TUJUAN 5: Meningkatkan Kesehatan Ibu

Program / Kegiatan	Indikator	Target Pencapaian				Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana			
		2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013			2014		
TARGET 5B: Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015															
Indikator MDGs:	1.	Angka pemakaian kontrasepsi/ <i>contraceptive prevalence rate</i> (CPR) CPR cara modern pada wanita usia 15-49 tahun													
	2.	Angka kelahiran pada remaja (per 1000 perempuan usia 15-19 tahun)													
	3.	Cakupan pelayanan antenatal (K1 dan K4)													
	4.	Unmet need KB													
Program Kependudukan dan Keluarga Berencana															
NASIONAL															
Kegiatan 1: Pembinaan, kesertaan, dan kemandirian ber-KB melalui 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta	1.	Jumlah klinik KB pemerintah dan swasta yang melayani KB	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	533.1	979.5	963.1	941.6	960.9	APBN	BKKBN
	2.	Jumlah peserta KB baru miskin (Keluarga Prasejahtera/KPS dan Keluarga Sejahtera I/KS-1) dan rentan lainnya yang mendapatkan pelayanan serta mendapatkan alokasi gratis melalui 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta (juta)	3.75	3.8	3.89	3.97	4.05								
	Pusat														
	2aP	Pemberian alat dan obat kontrasepsi/alokan gratis bagi peserta KB baru miskin	3.75	3.8	3.89	3.97	4.05			748.2	885.7	787	798.5	APBN (DIPA PUSAT)	BKKBN Pusat

DAERAH													
- Provinsi													
	2aD	Pelayanan bagi peserta KB baru miskin	3.75	3.8	3.89	3.97	4.05	141.3	167.3	149.6	152.7	APBN (DIPA PUSAT)	BKKBN Provinsi
	2bD	Penggerakan MOP, MOW, dan IUD	MOP 11.945, MOW 21.600, IUD 600.200	MOP 12.945, MOW 27.680, IUD 607.200	MOP 12.480, MOW 26.330, IUD 642.870	MOP 12.787, MOW 27.063, IUD 621.524	MOP 13.420, MOW 28.022, IUD 651.808						
												APBD Provinsi	Badan KB Provinsi
- Kab/Kota													
												APBD Kab/Kota	Badan KB Kab/Kota
	3.	Jumlah peserta KB aktif miskin (KPS dan KS-1) dan rentan lainnya yang mendapatkan pembinaan dan alokasi gratis melalui 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta (juta)	11.9	12.2	12.5	12.8	13.1	979.5	963.1	941.6	960.9	APBN	BKKBN
Pusat													
	3aP	Pembinaan dan pemberian alokasi gratis bagi peserta KB aktif miskin	11.9	12.2	12.5	12.8	13.1	748.2	885.7	787	798.5	APBN (DIPA PUSAT)	BKKBN Pusat
DAERAH													
- Provinsi													
	3aD	Pembinaan bagi peserta KB aktif miskin	11.9	12.2	12.5	12.8	13.1	141.3	167.3	149.6	152.7	APBN (DIPA PUSAT)	BKKBN Provinsi
	3bD	Persentase komplikasi berat yang dilayani	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11						

[illegible]

TUJUAN 6 : Mengendalikan HIV/AIDS Malaria dan Penyakit Menular Lainnya (TB)

Program/Kegiatan/ Tindakan	Indikator	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana		
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015				
TARGET 6A : Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV dan AIDS hingga tahun 2015															
Indikator MDGs	1. Prevalensi HIV pada penduduk usia 15-24 tahun														
	2. Penggunaan kondom pada hubungan seks terakhir														
	3. Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS														
	4. Rasio kehadiran anak yatim piatu di sekolah terhadap anak bukan yatim piatu (usia 10-14 tahun)														
Nasional															
Program 1 : Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan															
Kegiatan 1 : Pengendalian Penyakit Menular Langsung	1. Prevalensi kasus HIV	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	-	265	293.0	298.0	307.0	-	APBN	Kementerian Kesehatan		
	2. Persentase penduduk 15 tahun ke atas menurut pengetahuan tentang HIV dan AIDS	75	85	90	95	-									
	3. Jumlah orang yang berumur 15 tahun atau lebih yang menerima konseling dan testing HIV	400,000	500,000	600,000	700,000	-									
	4. Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pencegahan penularan HIV sesuai pedoman	60	70	80	100	-									
	5. Penggunaan kondom pada kelompok hubungan seks berisiko tinggi (berdasarkan pengakuan pemakai)	35 (Perempuan) 20 (Laki-laki)	45 (Perempuan) 30 (Laki-laki)	55 (Perempuan) 40 (Laki-laki)	65 (Perempuan) 50 (Laki-laki)	-									

Daerah											
Kegiatan 1											
Kegiatan 2											
dst											
Target 6B : Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV dan AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010											
Indikator MDGs	1. Proporsi penduduk yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat antiretroviral										
Nasional											
Program 1 : Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan											
Kegiatan 1 : Pengendalian Penyakit Menular Langsung	1. Persentase ODHA yang mendapatkan <i>Anti Retroviral Treatment (ART)</i>	75	80	85	90	-	265	293.0	298.0	307.0	APBN Kementerian Kesehatan
Daerah											
Kegiatan 1											
Kegiatan 2											
dst											
Nasional											
Program 2 : Pembinaan Upaya Kesehatan											
Kegiatan 1 : Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan	1. Persentase RS Pemerintah menyelenggarakan pelayanan rujukan bagi Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA)	70	80	90	100	-	79	80.0	94.0	106.0	APBN Kementerian Kesehatan
Daerah											
Kegiatan 1											
Kegiatan 2											
dst											

[illegible]

TUJUAN 7 : Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET PENCAPAIAN						ALOKASI ANGGARAN					Sumber Pendanaan	Pelaksana	
		2010	2011	2012	2013	2014	2014/ 2015	2010	2011	2012	2013	2014			
Tujuan 7A : Memadukan prinsip-pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang															
Tujuan 7B : Mengurangi kehilangan keanekaragaman hayati, dan mengurangi kehilangan yang signifikan pada 2015															
Indikator MDGs:	7.1	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan													
	7.2	Jumlah emisi karbon dioksida (CO2e)													
	7.3	Jumlah konsumsi bahan perusak ozon (BPO) dalam metrik ton													
	7.4	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman													
	7.5	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan													
	7.6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial:													
	Sasaran	a.	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan terhadap luas daratan	52,43 (2008)										Meningkat	
		b.	Jumlah emisi karbon dioksida (CO2e)	1.711.626Gg CO2e (2008)											Menurun 26% dari BAU (2020)
c.		Jumlah konsumsi bahan perusak ozon (BPO) dalam metrik ton	CFC = 0 (2009)											HCFC berkurang 10%	
d.		Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	91,83 (2008)											kurang dari 80% MSY	
e.		Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	29,31 (2010)											Meningkat	
f.		Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial:	4,35 (2009)											Meningkat	

Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup																
Nasional dan Daerah																
Perindungan Atmosfir dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	1	Jumlah konsep kebijakan di bidang perlindungan atmosfer dan pengendalian dampak perubahan iklim	5	3	3	3	3	3			24.0	25.0	26.0	26.5	APBN	KLH
	2	% penyiaapan penyusunan perangkat untuk sektor yang akan mendapatkan bimbingan teknis untuk melakukan inventori GRK & BPO														
	3	Jumlah sektor yang mendapatkan bimbingan teknis untuk melakukan inventori GRK & BPO	3	3	6	6	6	6								
	4	% penetapan baseline untuk pengurangan konsumsi Bahan Perusak Ozon (BPO) - HCFC														
	5	% pengurangan konsumsi Bahan Perusak Ozon (BPO) - HCFC	1%	2%	3%	10%	10%	10%								
	6	Jumlah pemerintah daerah provinsi yang dilakukan pembinaan teknis untuk kajian kerentanan dan adaptasi perubahan iklim	3	5	7	9	11	11								
	7	Jumlah sektor dan daerah yang mendapatkan bimbingan teknis untuk melakukan kegiatan perlindungan atmosfer dan pengendalian dampak perubahan iklim	5	5	10	15	15	15								
	8	Implementasi konsep Program Kampung Iklim		5	5	5	5	5	5							

Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																		
Nasional dan Daerah																		
Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis	1	kawasan konservasi laut dan kawasan konservasi perairan tawar dan payau yang dikelola secara berkelanjutan seluas 4,5 juta ha	900 ribu ha	900 ribu ha	900 ribu ha	900 ribu ha	900 ribu ha	900 ribu ha	Meningkat		73.5	109.8	151.2	190.2	220.7	APBN	KKP	
	2	Jumlah kawasan konservasi dan jenis biota perairan dilindungi yang diidentifikasi dan dipetakan secara akurat.	9 kawasan dan 3 jenis	9 kawasan dan 3 jenis	9 kawasan dan 3 jenis	9 kawasan dan 3 jenis	9 kawasan dan 3 jenis	9 kawasan dan 3 jenis	Meningkat									
Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap																		
Nasional dan Daerah																		
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	1	Jumlah lokasi pemantauan dan evaluasi perlindungan dan pengkayaan SDI (prov)	6	33	33	33	33	33	33	33		37.5	53.4	71.4	88.4	103.9	APBN	KKP
	2	Jumlah ekosistem PUD yang teridentifikasi (8 prov per tahun)	8	8	8	8	8	8	8	33								
	3	Jumlah perairan teritorial dan kepulauan yang teridentifikasi sumber dayanya	1 WPP	11 WPP 33 prov	11 WPP 33 prov	11 WPP 33 prov	11 WPP 33 prov	11 WPP 33 prov	11 WPP 33 prov	11 WPP 33 prov	11 WPP 33 prov							
	4	Jumlah ZEEI yang teridentifikasi sumber dayanya (prov)	11	4	4	4	4	4	4	4	meningkat							

TUJUAN 7 : Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup

Program/ Kegiatan/ Tindakan	Indikator	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
TARGET 7C : Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015													
Indikator MDGs	1. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (perkotaan dan pedesaan)												
	2. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar (perkotaan dan pedesaan)												
Nasional													
Program 1 : Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan													
Kegiatan 1 : Penyehatan Lingkungan	1. Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	62,5	63	63,5	67	-	373.0	379.0	447.0	499.0	-	APBN	Kementerian Kesehatan
	2. Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat	90	95	100	100	-							
	3. Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat	67	69	72	75	-							
	4. Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	5,500	11,000	16,000	20,000	-							
Daerah													
Kegiatan 1													
Kegiatan 2													
dst													

Program/Kegiatan	Indikator	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (Rp miliar)					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
TARGET 7C : Menurunkan hingga separuhnya proporsi penduduk tanpa akses terhadap air minum layak dan sanitasi dasar pada 2015													
NASIONAL													
Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman													
Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan	Pembangunan prasarana dan sarana air limbah dengan sistem <i>off site</i> dan <i>on-site</i> (kab/kota)	93 kawasan	11 kab/ kota sistem off-site; 40 kab/kota sistem on-site	11 kab/ kota sistem off-site; 50 kab/kota sistem on-site	11 kab/ kota sistem off-site; 55 kab/kota sistem on-site	953.2	1,076.0	957.0	1,672.0				Kemen PU
DAERAH													
Kegiatan 1													
Kegiatan 2													
dst													
NASIONAL													
Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman													
Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah desa, kawasan MBR perkotaan, IKK, dan kawasan khusus (pemekaran, pulau terluar, perbatasan, terpencil, dan KAPET) yang terfasilitasi	1,283 desa 81 kawasan MBR 170 IKK 23 kawasan khusus 10 pelabuhan perikanan	500 desa 100 kawasan MBR 160 IKK 20 kawasan khusus 10 kawasan pelabuhan perikanan	700 desa 140 kawasan MBR 175 IKK 20 kawasan khusus 10 kawasan pelabuhan perikanan	813 desa 173 kawasan MBR 187 IKK 22 kawasan khusus 10 kawasan pelabuhan perikanan	2,855.7	1,880.0	2,304.0	3,147.0				Kemen PU
DAERAH													
Kegiatan 1													
Kegiatan 2													
dst													

TUJUAN 7: Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup

Program/Kegiatan	Indikator	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (Rp miliar)					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
TARGET 7D: Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020													
Indikator MDGs:	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan												
NASIONAL													
Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman													
Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Pengembangan Permukiman	Kawasan kumuh di perkotaan yang tertangani	112	30	30	22		74.0	75.0	66.0	45.0		APBN	Kemen PU
	Satuan unit hunian rumah susun yang terbangun dan infrastruktur pendukungnya	70 Twin Blok	140 Twin Blok	0	0		997.0	900.0	400.0	200.0		APBN	
DAERAH													
Kegiatan 1													
Kegiatan 2													
dst.													
NASIONAL													
Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman													
Fasilitasi dan Stimulasi Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh	Jumlah permukiman kumuh yang terfasilitasi (Ha)	100	150	175	180		160.0	240.0	280.0	288.0		APBN	Kemenpera
DAERAH													
Kegiatan 1													
Kegiatan 2													
dst.													

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH DALAM PERCEPATAN PENCAPAIAN MDG 4 (KOMPONEN KETENAGAAN)

Unit : Badan PPSDMK (Pusrengun SDMK)

No	Kegiatan	Indikator	Target				
			2011	2012	2013	2014	2015
Nasional							
		INPRES NO 3 TAHUN 2010					
		tersusunnya pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan strategis, mencakup jml, jenis, dan lokasi penempatannya					
		ditetapkannya Perpres tentang penempatan tenaga kesehatan strategis di puskesmas dan RS Kab/ Kota					
		penempatan tenaga kesehatan strategis terutama dokter, bidan dan perawat terutama di daerah-daerah sesuai kebutuhan terutama di daerah bermasalah kesehatan dan daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan sesuai formasi yang tersedia (%)					
Daerah							
	Kegiatan 1.	1. Tersusunnya pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan strategis, mencakup jml, jenis, dan lokasi penempatannya					
	Sub kegiatan 1a. Advocacy pembentukan unit fungsional perencanaan SDM kesehatan	Provinsi : Jumlah Kab/Kota yang memiliki unit fungsional perencanaan SDM Kesehatan yang terbentuk					
	Sub kegiatan 1b. Pelatihan Perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan pemerintah di Kab/ Kota	Jumlah tenaga perencana SDM Kesehatan yang dilatih					
	Sub kegiatan 1c . Pemetaan kebutuhan SDM kesehatan di tingkat Kab/Kota (jumlah, jenis dan lokasi penempatan)	Provinsi : Jumlah Kab/Kota yang memiliki peta kebutuhan SDM Kesehatan					
	Sub kegiatan 1d. Pengusulan rencana kebutuhan nakes strategis melalui formasi di saryankes pemerintah Kab/Kota	Jumlah formasi nakes strategis yang diusulkan					

	Kegiatan 1.	2. Ditetapkannya Perpres tentang penempatan tenaga kesehatan strategis di puskesmas dan RS Kab/Kota					
	Sub kegiatan 1a.						
	Kegiatan 1.	3. Penempatan tenaga kesehatan strategis terutama dokter, bidan dan perawat terutama di daerah-daerah sesuai kebutuhan terutama di daerah bermasalah kesehatan dan daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan sesuai formasi yang tersedia (%)					
	Sub kegiatan 1a. Penempatan nakes strategis di puskesmas DTPK prioritas Kab/Kota melalui penugasan khusus sesuai yang diusulkan	Jumlah nakes strategis yang ditempatkan di puskesmas DTPK prioritas Kab/Kota					
	Sub kegiatan 1b. Penempatan nakes strategis di RSUD Kab/Kota melalui penugasan khusus sesuai yang diusulkan	Jumlah nakes strategis yang ditempatkan di RSUD Kab/Kota					
	sub kegiatan 1c. Peningkatan kompetensi nakes di saryankes Kab/Kota melalui pendidikan berkelanjutan (tugas belajar) bagi nakes strategis (dokter umum, perawat, bidan, dan tenaga gizi)	Jumlah nakes strategis yang ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan berkelanjutan (tugas belajar)					
	Sub kegiatan 1d. Peningkatan kompetensi nakes melalui pelatihan teknis, fungsional, manajemen kesehatan berdasarkan kebutuhan program	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan teknis, fungsional, manajemen kesehatan berdasarkan kebutuhan program terutama untuk mencapai target MDGs 1C, 4, 5, 6, dan 7C					

